

**PENGARUH DEWAN DIREKSI DAN PENGUNGKAPAN ESG
TERHADAP OPINI AUDIT *GOING CONCERN* DENGAN UMUR
PERUSAHAAN SEBAGAI PEMODERASI PADA PERUSAHAAN ENERGI
YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2020-2024**

(Skripsi)

Oleh :

**ILHAM ABI YANSYAH
NPM 2211031175**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

**PENGARUH DEWAN DIREKSI DAN PENGUNGKAPAN ESG
TERHADAP OPINI AUDIT *GOING CONCERN* DENGAN UMUR
PERUSAHAAN SEBAGAI PEMODERASI PADA PERUSAHAAN ENERGI
YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2020-2024**

**Oleh
ILHAM ABI YANSYAH**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA AKUNTANSI**

**Pada

Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

PENGARUH DEWAN DIREKSI DAN PENGUNGKAPAN ESG TERHADAP OPINI AUDIT *GOING CONCERN* DENGAN UMUR PERUSAHAAN SEBAGAI PEMODERASI PADA PERUSAHAAN ENERGI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2020-2024

Oleh:

ILHAM ABI YANSYAH

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dewan Direksi serta pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) terhadap Opini Audit *Going Concern* (OAGC) dengan umur perusahaan sebagai variabel pemoderasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah meningkatnya ketidakpastian pada sektor energi, yang dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas, tekanan regulasi, kebijakan transisi energi, dan risiko distress keuangan, yang dapat mempengaruhi penilaian auditor terhadap kelangsungan usaha perusahaan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran Dewan Direksi dan pengungkapan ESG, sementara variabel dependen yang digunakan adalah Opini Audit *Going Concern*. Umur perusahaan berfungsi sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan sektor energi. Metode kuantitatif dengan analisis regresi logistik digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 15 perusahaan yang dianalisis, terdapat 5 perusahaan energi yang menerima Opini Audit *Going Concern*. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa Dewan Direksi dan pengungkapan ESG tidak berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit *Going Concern*. Namun, umur perusahaan terbukti secara signifikan memoderasi pengaruh Dewan Direksi terhadap Opini Audit *Going Concern*, sedangkan umur perusahaan tidak memoderasi pengaruh pengungkapan ESG terhadap Opini Audit *Going Concern* secara signifikan.

Kata Kunci: Dewan Direksi, Pengungkapan ESG, Umur Perusahaan, Opini Audit *Going Concern*, Regresi Logistik.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF THE BOARD OF DIRECTORS AND ESG DISCLOSURE ON GOING CONCERN AUDIT OPINIONS WITH FIRM AGE AS A MODERATING VARIABLE IN ENERGY COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE FOR THE 2020–2024 PERIOD

By:

ILHAM ABI YANSYAH

The phenomenon underlying this research is the increasing uncertainty in the energy sector; influenced by commodity price fluctuations, regulatory pressures, energy transition policies, and financial distress risks, all of which may affect auditors' assessments of a company's ability to continue as a going concern. The independent variables in this study are the size of the Board of Directors and ESG disclosure, while the dependent variable is the Going Concern Audit Opinion. Firm age functions as a moderating variable. This study uses secondary data obtained from the annual reports and financial statements of energy sector companies. A quantitative method with logistic regression analysis is employed to test the proposed hypotheses. The results show that out of 15 companies analyzed, 5 energy companies received a Going Concern Audit Opinion. The analysis also indicates that the Board of Directors and ESG disclosure do not have a significant effect on Going Concern Audit Opinions. However, firm age is proven to significantly moderate the effect of the Board of Directors on Going Concern Audit Opinions, while it does not significantly moderate the effect of ESG disclosure on Going Concern Audit Opinions.

Keywords: *Board of Directors, ESG Disclosure, Company Age, Going Concern Audit Opinion, Logistic Regression.*

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi

: Pengaruh Dewan Direksi dan Pengungkapan
ESG terhadap Opini Audit *Going Concern*
dengan Umur Perusahaan sebagai Pemoderasi
pada Perusahaan Energi yang Terdaftar di BEI
Tahun 2020–2024

Nama Mahasiswa

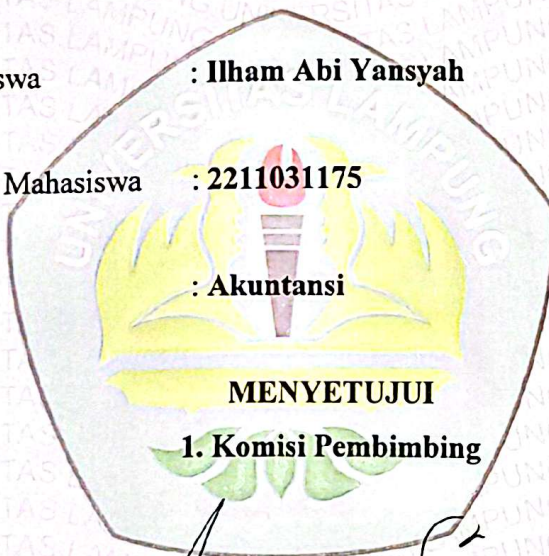
: Ilham Abi Yansyah

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2211031175

Jurusan

: Akuntansi



Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si, Ak., CPA
NIP. 19751026 20021 2 2002

2. Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Agrianti Komala Sari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA
NIP. 19700801 199512 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

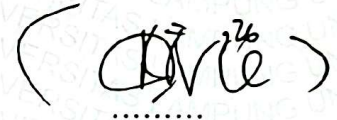
Ketua : **Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si, Ak., CPA**



Penguji Utama: **Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.S.Ak.**



Penguji Kedua: **Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A., Ak., CA.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si
NIP. 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Februari 2026

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Abi Yansyah

NPM : 2211031175

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul "Pengaruh Dewan Direksi dan Pengungkapan ESG terhadap Opini Audit Going Concern dengan Umur Perusahaan sebagai Pemoderasi pada Perusahaan Energi yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2024" adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian penulisan, pemikiran, dan pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah tulisan saya tanpa memberikan pengakuan penulisan aslinya. Apabila ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 11 Maret 2026

Penulis



Ilham Abi Yansyah

2211031175

RIWAYAT HIDUP



Penulis Skripsi ini Bernama Ilham Abi Yansyah, Lahir di Sidodadi pada 25 Februari 2004. Sebagai anak pertama dari Ibu Sumardiyah dan Bapak Sapto. Penulis menempuh pendidikan formal dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyah pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Sidodadi pada tahun 2010–2016. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Metro pada tahun 2016–2019, dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Metro pada tahun 2019–2022. Penulis merupakan mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, yang diterima melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2022. Selama masa perkuliahan, penulis berhasil menjadi peserta program MBKM Wirausaha dari Kemendikbudristek pada tahun 2024. Dalam kegiatan kemahasiswaan, penulis aktif berorganisasi dan kepanitiaan, khususnya di Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung sebagai Staff Keuangan periode 2023/2024. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan perlombaan tingkat nasional, salah satunya berhasil meraih Juara 1 tingkat nasional dalam lomba business plan tahun 2024. Di luar akademik, penulis terlibat dalam berbagai kegiatan volunteer dan proyek lokal sebagai bentuk pengembangan kapasitas diri dan kepedulian sosial, khususnya di Ruang Pangan Lampung, di mana penulis mengembangkan kemampuan soft skill dan hard skill, membentuk keluarga baru, serta mendapatkan kesempatan-kesempatan baru sebagai manager public relations. Selain itu, penulis memperoleh pengalaman profesional melalui magang di Akira Training Center dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Bandar Lampung, yang memberikan pemahaman langsung mengenai praktik kerja di lingkungan industri jasa dan ritel.

PERSEMBAHAN

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Orang tuaku Terkasih, Ibuku Sumardiyah dan Ayahku Sapto.

Dengan penuh rasa syukur dan cinta, Skripsi ini penulis dedikasikan kepada orang tua tercinta. Setiap langkah dan pencapaian yang penulis raih tidak lepas dari doa tulus dan pengorbanan mereka. Seperti yang tertulis dalam lirik lagu, "Pasti doamu yang lancarkan upayaku," doa orang tua menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai dalam setiap perjalanan hidup penulis. Setiap proses yang dilalui hingga sampai pada tahap ini tidak terlepas dari doa tulus, pengorbanan, serta kasih sayang yang mengiringi langkah penulis. Semoga karya ini adalah bentuk kecil dari ungkapan terima kasih atas segala kasih sayang dan doa yang tak pernah berhenti.

Adikku Tersayang, Mirza Farhad Prayoga.

Terima kasih atas kebersamaan, doa, dan dukungan yang selalu hadir dalam setiap langkah penulis. Kehadiranmu selalu menjadi alasan dan penguat di tengah proses yang panjang dan melelahkan. Semoga Allah SWT melindungi dan memudahkan langkahmu dalam meraih masa depan yang terbaik.

Seluruh Keluarga, Saudara, Sahabat, serta Teman-Teman

Terima kasih atas doa, dukungan, serta kebersamaan yang telah diberikan dan senantiasa menguatkan penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan perhatian yang tulus menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan setiap tahapan hingga akhir.

Almamater Tercinta, Universitas Lampung

MOTTO

Janganlah merasa ragu terhadap dirimu.

"Janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan (pula) bersedih hati, padahal kamu paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang-orang mukmin."

— **QS. Ali ‘Imran ayat 54 (QS. 3:54)**

“Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.”

— **QS. Al Baqarah: 147**

“Selalu berdoa untuk menjadi sosok yang berani dan beruntung.”

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah rabbil ‘*alamin*, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Dewan Direksi dan Pengungkapan ESG terhadap Opini Audit *Going Concern* dengan Umur Perusahaan sebagai Pemoderasi pada Perusahaan Energi yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2024”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sekaligus selaku dosen penguji pertama yang membersamai dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Retno Yuni Nur Susilowati, S.E, M.Sc., Akt. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang juga membersamai saat proses penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Ak., CPA., selaku Pembimbing sekaligus orang tua kedua penulis yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, memberikan kritik dan saran yang konstruktif selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala dukungan dan nasihat yang tidak pernah putus diberikan selama proses penyusunan skripsi, penulis sangat menghargai ilmu yang telah dibagikan;

5. Bapak Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.S.Ak. selaku Dosen Pembahas Pertama yang telah memberikan masukan, saran, dan arahan yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A., Ak., CA. selaku Dosen Pembahas Kedua yang telah memberikan kritik dan saran yang konstruktif sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lebih baik, juga selalu memberikan kesempatan dan selalu memberikan perhatian yang sangat berarti.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengetahuan bagi penulis selama proses perkuliahan berlangsung.
8. Para staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang telah banyak membantu baik selama proses perkuliahan maupun semasa penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tuaku tercinta, Ibu Sumardiyah dan Ayah Sapto, yang dengan ketulusan doa, kesabaran, serta pengorbanan yang tidak pernah terucap telah menjadi sumber kekuatan utama bagi penulis. Seperti yang tertulis dalam lirik lagu, "Pasti doamu yang lancarkan upayaku," doa mereka menjadi kekuatan yang tak ternilai dalam setiap perjalanan hidup penulis. Dalam setiap proses yang dijalani, baik pada saat lelah, ragu, maupun hampir menyerah, doa dan kehadiran merekalah yang senantiasa menguatkan penulis untuk terus melangkah. Berkat kepercayaan, kasih sayang, dan pengorbanan yang selalu diberikan, penulis mampu bertahan hingga akhirnya menyelesaikan karya ini.
10. Mbah Lanang, Mbah Anang, Simbok, dan Mbah Wedokku yang terdekat di hati, (alm) Bapak Jumari, Bapak Jumadi, (almh) Ibu Kaliyem dan (almh) Ibu Supinah, yang telah mendampingi penulis sejak kecil dan menjadi sosok orang tua dalam kehidupan penulis. Kasih sayang, perhatian, serta ketulusan yang diberikan telah membentuk kepribadian penulis seperti saat ini hingga mampu bertahan dan menyelesaikan setiap proses. Jejak doa dan nasihat yang ditanamkan sejak dini akan senantiasa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan hidup penulis.
11. Adik-adikku tersayang, Mirza, Zilla, dan Oce, yang dengan tawa ceria dan kebersamaan tulus senantiasa menemani penulis di saat-saat lelah. Kehadiran

kalian menjadi sumber semangat dan penguat langkah bagi penulis untuk bertahan dan menyelesaikan setiap proses hingga tahap ini. Kalian juga selalu menjadi alasan penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik, agar dapat menjadi contoh yang baik bagi kalian.

12. Keluarga penulis, yang senantiasa hadir dan kebersamai setiap perjalanan hidup penulis, khususnya Almh. Mbah Nur, Alm. Om Eko, Pakde Gun, Bude Ning, Lek Tun, Lek Dah, serta sepupu-sepupuku, Raafly Ariyandi, Ibnu Vitzal Riva'i, dan Raihan Firdaus. Terima kasih atas doa yang terpanjat dari kejauhan, dukungan, perhatian, dan kebersamaan yang tulus, yang menguatkan penulis dalam menapaki setiap tahapan proses.
13. Sahabat-sahabat penulis, Andi, Auli, Naufal, Aldi, Mifta, Wulan, Rico, Jovita, Fajar, Lazuardi, Yovi, Adit, Roy, Arya, Adhi, Reval, Aldus, dan Rinaldi, terima kasih atas kehadiran, kesabaran, dan ketulusan dan kebersamaan yang telah mewarnai perjalanan penulis selama masa perkuliahan. Di setiap bahagia, keluh kesah kalian hadir sebagai tempat berbagi, dan saling menguatkan, sekaligus memberikan bantuan yang sangat berarti bagi penulis hingga penyusunan skripsi ini. Penulis berharap persahabatan ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi tetap terjaga dan tumbuh seiring perjalanan hidup masing-masing.
14. Teman-teman bimbinganku, Ghina, Syartika, Rayhana, Talitha, Rizka, dan Imel, terima kasih atas kebersamaan yang terjalin selama proses bimbingan, di mana penulis tidak hanya belajar bersama, tetapi juga berbagi keluh kesah, saling menguatkan, dan memberi doa. Proses yang dijalani bersama tersebut menjadi bagian penting yang menguatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini hingga tahap akhir. Penulis berharap setiap langkah yang kalian tempuh ke depan dipenuhi dengan pencapaian yang bermakna, kesuksesan yang diraih dengan proses, serta tercapainya tujuan dan cita-cita yang selama ini diperjuangkan.
15. Keluarga Ruang Pangan 2025/2026, Kak Ahyar, Zed, Azmi, Dito, Dhefath, Ragil, Amar, Nara, Yolla, Alya, Atan, Salma, dan yang lainnya. Terima kasih atas kebersamaan dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis untuk mengemban amanah. Bersama kalian, penulis banyak belajar, tumbuh, dan merasa didukung sepenuhnya. Terima kasih atas semangat, dorongan, dan setiap momen kerja sama yang membuat perjalanan ini menjadi jauh lebih bermakna.

16. Keluarga Public Relations Saivara, Ali, Tegar, Rahmat, Bunga, Aley, Kikay, Kayla, Caca, Devi, dan Amanda. Terima kasih telah menjadi keluarga baru penulis yang selalu memberikan sumber kebahagiaan dan berkembang bersama.
17. Teman-teman KKN Sindang Marga, Albeth, Nanda, Andin, Fatim, Naomi, dan Anjel, terima kasih atas semua kebersamaan, cerita, dan tawa yang kita lewati bersama selama 40 Hari. dan semoga hubungan baik ini tidak berhenti di sini. Semoga kita tetap saling terhubung dan kebersamai langkah satu sama lain ke depannya.
18. Kakak tingkatku, Kak Alung, terima kasih atas arahan, dukungan, dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan. Kehadiran dan nasihat yang diberikan sangat berarti dalam membantu penulis memahami banyak hal dan menjalani setiap proses dengan lebih percaya diri.
19. Pemberi dukungan terbaik, Adik dan Ibu, yang selalu memberikan yang terbaik selama penyusunan skripsi. Penulis berharap dapat membalas kebaikan dan perhatian yang diberikan, serta selalu hadir di setiap waktu yang dibutuhkan. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan limpahan rezeki oleh Allah SWT.
20. Keluarga Griya Paramitha Kost, Eyang Kakung, Eyang Uti, Demong, Deni, Eri, Bayu, Munte, Rafi, Alfath, Ariq, Habibie, Aqil, Ciwek, Fatih, Biru, dan lainnya, yang selalu ada di setiap waktu penulis membutuhkan bantuan, hiburan, dan dukungan. Penulis berharap kalian bisa mencapai impian dan selalu diberikan kesehatan.
21. Ruang tumbuhku, Saycheeseroll.bdl, yang selalu menjadi tempat bagi penulis untuk melimpahkan apa yang sedang dirasakan dan menjadi sumber penghidupan penulis. Penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang mendukung bisnis ini, terutama satu keluarga yang telah memberikan ide dan dukungan. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah SWT.
22. Teman-temanku selama perkuliahan, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan, bantuan, dan cerita yang telah mewarnai masa perkuliahan ini. Semoga kita semua diberikan kelancaran dalam setiap langkah dan tetap saling mendukung di mana pun berada.

23. Untuk diri saya sendiri, terima kasih sudah tetap berdiri bahkan saat tidak ada yang benar-benar tahu seberapa lelahnya kamu. Kamu mungkin sering merasa kurang dan meragukan kemampuanmu sendiri, tetapi nyatanya kamu terus melangkah, pelan tapi tidak pernah benar-benar berhenti. Skripsi ini bukan hanya tentang gelar, tetapi tentang proses menjadi lebih kuat, tentang doa yang diam-diam dipanjatkan, dan tentang keberanian untuk tetap mencoba. Terima kasih sudah sampai di titik ini. Kamu sudah berjuang, dan itu tidak pernah sia-sia.

Sebagai bagian akhir dari penelitian ini, penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan. Meskipun demikian, penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat yang berarti serta menjadi rujukan bagi penelitian dan pengembangan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Bandar Lampung, 11 Maret 2026

Penulis



Ilham Abi Yansyah

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I	13
PENDAHULUAN	13
1.1 Latar Belakang	13
1.2 Rumusan Masalah	23
1.3 Tujuan Penelitian	23
1.4 Manfaat Penelitian	23
BAB II	25
TINJAUAN PUSTAKA	25
2.1 Landasan Teori	25
2.1.1 Teori Keagenan	25
2.1.2 Teori Legitimasi	29
2.2 Variabel Penelitian	34
2.2.1 Opini Audit <i>Going Concern</i>	34
2.2.2 Tinjauan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	40
2.2.3 Tinjauan <i>Environmental, Social, Governance</i> (ESG)	45
2.2.4 Tinjauan Umur Perusahaan	53
2.3 Pengembangan Hipotesis	54
2.3.1 Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap opini audit <i>Going Concern</i>	54
2.3.2 Pengungkapan <i>Environmental, Social, and Governance</i> (ESG) berpengaruh negatif terhadap opini audit <i>Going Concern</i>	57
2.3.3 Umur perusahaan memoderasi pengaruh Dewan Direksi terhadap opini audit <i>Going Concern</i>	60
2.3.4 Umur perusahaan memoderasi pengaruh pengungkapan <i>Environmental, Social, and Governance</i> (ESG) terhadap opini audit <i>Going Concern</i>	61
2.4 Kerangka Pemikiran	63
2.5 Penelitian Terdahulu	64
BAB III	66
METODOLOGI PENELITIAN	66
3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data	66

3.2 Populasi dan Sampel	66
3.2.1 Populasi.....	66
3.2.2 Sampel.....	67
3.3 Definisi Operasional Variabel	69
3.4 Metode Pengambilan Data.....	71
3.5 Metode Analisis Data.....	71
3.5.1 Menilai Kelayakan Model Regresi	72
3.5.2 Menilai Model Fit (Overall Model Fit Test).....	72
3.5.3 Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square).....	73
3.5.4 Tabel Klasifikasi	73
3.5.5 Model Regresi Logistik.....	74
3.5.6 Uji Hipotesis	75
BAB IV	77
HASIL DAN PEMBAHASAN	77
4.1 Analisis Statistik Deskriptif	77
4.1.1 Variabel Dependen.....	77
4.2.2 Variabel Independen	78
4.2.3 Variabel Moderasi.....	78
4.3 Uji Asumsi Klasik Multikolinearitas.....	79
4.4 Uji Kelayakan Model Regresi.....	81
4.4.1 Uji Kecocokan (Goodness of fit Test)	81
4.4.2 Uji Keseluruhan Model (Overall Model fit)	81
4.5 Hasil Uji Regresi Logistik	83
4.5.1 Uji Koefisien Determinasi	83
4.5.2 Uji Simultan F.....	83
4.5.3 Uji Persial t (Uji <i>Wald</i>)	84
4.6 Hasil Pembahasan	86
4.6.1 Hasil Content Analysis Perusahaan Sektor Energi dalam Penerimaan Opini Audit <i>Going Concern</i>	86
4.6.2 Pengaruh Dewan Direksi terhadap Opini Audit <i>Going Concern</i> (OAGC).....	93
4.6.3 Pengaruh Pengungkapan ESG terhadap Opini Audit <i>Going Concern</i> (OAGC)	96
4.6.4 Peran Umur Perusahaan dalam Memoderasi Pengaruh Dewan Direksi terhadap Opini Audit <i>Going Concern</i> (OAGC).....	100

4.6.5 Peran Umur Perusahaan dalam Memoderasi Pengaruh Pengungkapan ESG terhadap Opini Audit <i>Going Concern</i> (OAGC)	103
BAB V PENUTUP	106
5.1 Kesimpulan	106
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	107
5.3 Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	113

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perusahaan yang Dinyatakan Delisting 2018–2024	15
Tabel 2.1 Aspek Pengungkapan <i>Environmental</i> GRI 300	48
Tabel 2.1 Aspek Pengungkapan <i>Social</i> GRI 300	50
Tabel 2.1 Aspek Pengungkapan <i>Governance</i> GRI 300	52
Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	77
Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas Sebelum <i>Mean Centering</i>	79
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas Setelah <i>Mean Centering</i>	80
Tabel 4.4 Hasil Uji Kelayakan Model (Hosmer and Lemeshow Test)	81
Tabel 4.5 Hasil Uji -2 Log Likelihood Number 0	82
Tabel 4.6 Hasil Uji -2 Log Likelihood Number 1	82
Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square)	83
Tabel 4.8 Tabel Klasifikasi (Classification Table)	83
Tabel 4.9 Hasil Uji Wald (Uji Parsial)	84
Tabel 4.10 Indikator Identifikasi Penerimaan Opini Audit <i>Going Concern</i>	87
Tabel 4.11 Hasil Identifikasi Perusahaan Energi dalam Penerimaan Opini Audit <i>Going Concern</i> 2020-2024.....	88
Tabel 4.12 Perusahaan Energi Menerima Opini Audit <i>Going Concern</i> 2020-2024.....	89
Tabel 4.13 Analisis Perusahaan Energi dalam Penerimaan Opini Audit <i>Going Concern</i> 2023-2024.....	91

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Hierarki Peraturan dan Keputusan	17
Gambar 1.2 Survei Tingkat Kepentingan Pengungkapan ESG	19
Gambar 4.1 Proporsi Opini Audit <i>Going Concern</i> pada Ukuran Dewan Direksi Periode 2020–2024	94
Gambar 4.2 Proporsi Opini Audit <i>Going Concern</i> berdasarkan ESG Rating Periode 2020–2024	99
Gambar 4.3 Proporsi Opini Audit <i>Going Concern</i> pada Umur Perusahaan Periode 2020–2024	101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada para pemangku kepentingan. Laporan keuangan merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk menilai kinerja serta posisi keuangan suatu entitas. Laporan ini tidak hanya sekadar menjadi kumpulan angka, tetapi merepresentasikan akuntabilitas manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan secara efektif. Selain itu, laporan keuangan juga berfungsi sebagai sarana komunikasi antara perusahaan dengan pihak eksternal, memberikan informasi yang relevan dan andal bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (Fitriani et al., 2023). Keandalan informasi ini menentukan kualitas keputusan strategis yang dibuat oleh investor, kreditor, regulator, bahkan publik yang berkepentingan.

Menurut PSAK No. 1, laporan keuangan disusun dengan tujuan memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu perusahaan, yang berguna bagi pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi. Laporan keuangan lengkap meliputi komponen-komponen berikut: neraca pada akhir periode, laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya untuk periode tersebut, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan yang memuat kebijakan akuntansi yang signifikan dan penjelasan tambahan, informasi perbandingan dari periode sebelumnya, serta neraca pembukaan dari periode sebelumnya yang paling baru jika terjadi penerapan retrospektif atau reklasifikasi (IAI, 2015). Lebih lanjut, PSAK 1 juga menegaskan prinsip materialitas dalam penyajian laporan keuangan, yaitu entitas tidak boleh mengurangi pemahaman atas laporan keuangan dengan mengaburkan informasi material dengan informasi yang

tidak material atau menggabungkan pos-pos material yang memiliki sifat atau fungsi berbeda (IAI, 2015). Informasi ini menjadi dasar bagi berbagai pihak untuk merumuskan strategi investasi, pembiayaan, hingga pengawasan terhadap perusahaan. Terdapat salah satu asumsi fundamental yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan mempengaruhi strategi investasi, pembiayaan, hingga pengawasan, yaitu asumsi kelangsungan usaha (*Going Concern*).

Asumsi kelangsungan usaha atau *Going Concern* mengandung keyakinan bahwa entitas akan tetap beroperasi secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang dapat diperkirakan dan tidak akan dilikuidasi dalam waktu dekat (Nur et al., 2023). Pentingnya asumsi ini terletak pada implikasinya terhadap metode akuntansi yang digunakan. Apabila asumsi kelangsungan usaha tidak terpenuhi, maka perusahaan harus mengadopsi basis likuidasi yang secara signifikan mengubah metode penilaian aset dan liabilitas. Hal ini akan berdampak luas, tidak hanya pada nilai laporan keuangan, tetapi juga pada persepsi investor dan kreditor. Oleh sebab itu, penilaian atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usaha menjadi aspek krusial, baik bagi manajemen sebagai pengambil keputusan maupun auditor independen yang bertugas memberikan opini objektif. Dalam praktik audit, terdapat opini *Going Concern*, yang dikeluarkan oleh auditor pada saat auditor menemukan kemungkinan sinyal dini (*early warning*) bagi pemangku kepentingan terkait potensi kesulitan keuangan atau ancaman kebangkrutan yang mungkin dihadapi perusahaan (Nadzif & Agung Durya, 2022).

Opini audit *Going Concern* memiliki dampak yang perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi kepercayaan investor, harga saham, serta akses perusahaan terhadap pendanaan. Fenomena fluktuasi pemberian opini audit *Going Concern* di Bursa Efek Indonesia (BEI), mencerminkan dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi keuangan perusahaan, penerapan tata kelola, hingga tekanan makroekonomi (Widhiastuti & Putu Diah Kumalasari, 2022). Meskipun asumsi kelangsungan usaha merupakan hal penting dalam akuntansi, kenyataannya sejumlah perusahaan di Indonesia mengalami kesulitan keuangan yang serius hingga berakhir dengan *force delisting* dari bursa. Contoh nyata yang belakangan

ini terjadi adalah PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang dinyatakan pailit pada 2024 (Sibarani et al., 2025). Contoh tersebut menjadi sinyal bahwa risiko kebangkrutan dapat mengancam perusahaan mana pun, tanpa memandang skala usaha maupun reputasi yang dimilikinya. Lalu, ada pula perusahaan-perusahaan yang dinyatakan delisting dari Bursa Efek Indonesia selama tahun 2018 sampai dengan 2024.

Table 1.1 Perusahaan yang Dinyatakan Delisting 2018-2024

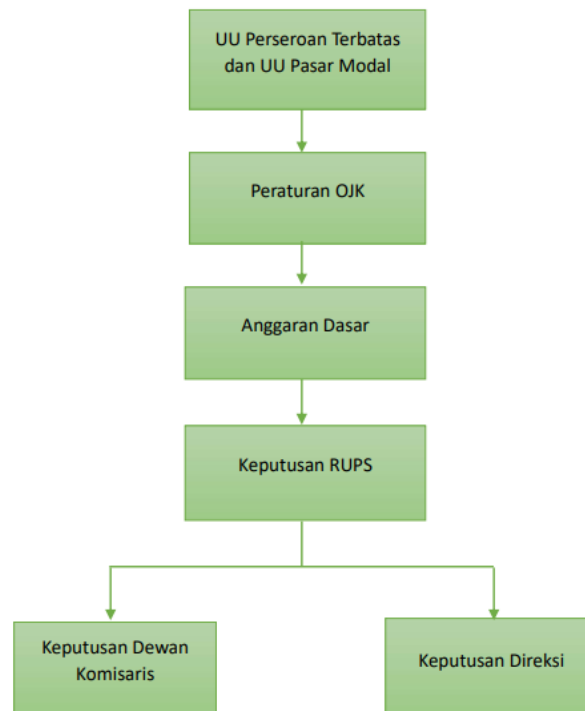
Tahun	Jumlah Emiten Delisting ¹	Nama Emiten dan Kode Saham	Alasan <i>Delisting</i>
2018	4	PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk (DAJK)	<i>Force delisting – Going Concern</i>
		Truba Alam Manunggal Engineering Tbk (TRUB)	<i>Force delisting – Going Concern</i>
		Jaya Pari Steel Tbk (JPRS)	<i>Merger</i>
		Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk (SQBB)	<i>Voluntary delisting</i>
2019	6	PT Bank Mitraniaga Tbk (NAGA)	<i>Merger</i>
		Sekawan Intipratama Tbk (SIAP)	<i>Force delisting – Going Concern</i>
		Bara Jaya Internasional Tbk (ATPK)	<i>Force delisting – Going Concern</i>
		Bank Nusantara Parahyangan Tbk (BBNP)	<i>Merger</i>
		Grahamas Citrawisata Tbk (GMCW)	<i>Force delisting – Going Concern</i>
		PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk (eks Telaga Mas Pertiwi Tbk)	<i>Force delisting – Going Concern</i>
2020	6	Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN)	<i>Force delisting – Going Concern</i>
		Leo Investments Tbk (ITTG)	<i>Force delisting – Going Concern</i>
		Arpeni Pratama Ocean Line Tbk (APOL)	<i>Force delisting – Going Concern</i>
		Danayasa Arthatama Tbk (SCBD)	<i>Voluntary delisting</i>
		Cakra Mineral Tbk (CKRA)	<i>Force delisting – Going Concern</i>
		Evergreen Invesco Tbk (GREN)	<i>Force delisting – Going Concern</i>
2021	1	PT First Indo American Leasing Tbk (FINN)	<i>Force delisting – Suspensi</i>
2023	1	Tunas Ridean Tbk (TURI)	<i>Voluntary delisting – Suspensi</i>
2024	1	Bentoel International Investama Tbk (RMBA)	<i>Voluntary delisting – Suspensi</i>

Sumber: Sahamu.com dan idx.co.id, diolah peneliti 2025

Tabel 1.1 menunjukkan adanya tren delisting yang cukup signifikan di Bursa Efek Indonesia, di mana sebagian besar kasus disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketidakmampuan menjaga tata kelola perusahaan bisa disebabkan oleh lemahnya pengawasan internal, pengelolaan risiko, serta kegagalan manajemen dalam melindungi kepentingan jangka panjang perusahaan (Tandiontong, 2015). Kondisi ini menjadi sinyal peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa risiko kegagalan bisnis bukan hanya persoalan finansial, tetapi juga berkaitan erat dengan efektivitas tata kelola perusahaan (Widhiastuti & Putu Diah Kumalasari, 2022). Hal tersebut juga mendorong manajemen untuk mengambil keputusan strategis, seperti *merger* atau voluntary delisting, yang pada akhirnya berujung pada penghapusan emiten dari bursa. Maka dari itu, perusahaan seharusnya dapat menerapkan tata kelola perusahaan atau manajemen yang baik atau yang disebut *Good Corporate Governance* (GCG) (Purnamasari et al., 2020)

Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu mekanisme penting yang berperan dalam memitigasi risiko-risiko pada perusahaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Penerapan GCG tidak hanya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga memperkuat struktur pengawasan sehingga potensi perilaku oportunistik manajemen dapat diminimalisir. Hal ini sejalan dengan pandangan Teori Keagenan (*Agency Theory*) yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (2012), yang menekankan bahwa tata kelola yang baik mampu mengurangi asimetri informasi dan konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Dengan pengawasan yang efektif, penerapan GCG diyakini dapat memberikan sinyal positif kepada pasar dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek keberlangsungan usaha (Shaferi et al., 2018). Selain itu, dari seluruh elemen atau pihak dalam suatu perusahaan, Dewan Komisaris memiliki kepentingan dan pengaruh besar dalam manajemen internal perusahaan, yaitu memastikan efektivitas tata kelola perusahaan yang baik (*Governance*, 2006).

Gambar 1.1 Hierarki Peraturan dan Keputusan



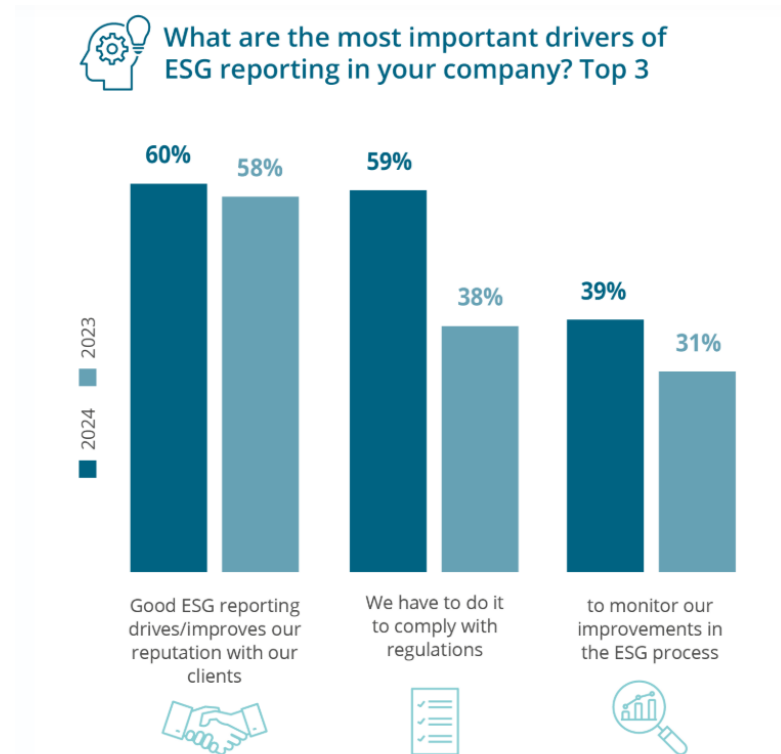
Sumber: Idx.id, 2024

Gambar 1.1 merupakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia versi 2.0 (2024), berisi kerangka hukum dan pedoman perusahaan di pasar modal yang mengacu pada beberapa regulasi penting. Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) dan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) menjadi dasar hukum tertinggi yang mengatur operasional perusahaan sebagai entitas publik dan perseroan terbatas. Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menjadi rujukan utama dalam penyusunan peraturan internal perusahaan yang beroperasi di pasar modal. Di samping regulasi tersebut, perusahaan wajib berpedoman pada Anggaran Dasar yang berisi ketentuan tentang pembuatan aturan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Selanjutnya, keputusan yang dihasilkan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memuat hal-hal yang memerlukan persetujuan pemegang saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Dewan Komisaris juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan terkait fungsi pengawasan dan pemberian saran sesuai peraturan perundang-undangan, sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dewan. Sementara itu, keputusan Direksi berfokus pada penetapan aturan

internal maupun eksternal perusahaan. Keputusan internal mencakup peraturan dan kebijakan perusahaan, sedangkan keputusan eksternal meliputi peraturan perusahaan dan surat edaran yang menjadi landasan pelaksanaan tugas.

Selain Dewan Direksi dari *Good Corporate Governance* (GCG), konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam beberapa tahun terakhir memperoleh perhatian yang semakin luas, baik di tingkat global maupun nasional. Isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola kini tidak hanya memengaruhi cara perusahaan beroperasi, tetapi juga turut menentukan arah kebijakan investasi. Tren ini menunjukkan bahwa investor semakin menilai kinerja ESG sebagai indikator utama keberlanjutan sekaligus wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Pergeseran orientasi praktik bisnis global ini mencerminkan penekanan baru pada isu-isu lingkungan dan sosial yang mendesak (Zahid et al., 2023). ESG bukan sekadar alat ukur kinerja korporasi, tetapi juga merupakan instrumen strategis dalam mempromosikan nilai keberlanjutan dan etika bisnis demi tercapainya *Sustainable Development Goals* (SDGs) bagi masyarakat luas yang terdampak oleh aktivitas perusahaan (Kementerian Keuangan, 2021).

Dalam praktiknya, penerapan ESG menuntut perusahaan untuk secara transparan mengungkapkan informasi terkait dampak sosial, keberlanjutan lingkungan, dan tata kelola yang dijalankan. Seperti yang dikemukakan oleh Adardour et al. (2025), *“With the economy evolving, business landscapes shifting, and regulations tightening, companies are increasingly integrating ESG criteria into their strategies and more transparent in their disclosures.”*. Selain itu, pengungkapan yang komprehensif tidak hanya mencerminkan bentuk tanggung jawab, melainkan juga diyakini mampu memperkuat reputasi, memperluas akses terhadap pendanaan, sekaligus menekan risiko penolakan pasar. Relevansi ESG semakin diperkuat oleh temuan PwC *Global Investor Survey* (2022) yang mengungkapkan bahwa 49% investor menempatkan efektivitas tata kelola sebagai prioritas utama, sementara 44% lainnya menekankan pentingnya komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca.



Gambar 1.2 Survei Tingkat Kepentingan Pengungkapan ESG

Sumber: BARC, 2024

Hasil survei BARC (2024) menunjukkan bahwa pendorong utama penerapan ESG reporting dalam perusahaan bukan hanya sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga terkait dengan upaya memperkuat reputasi di mata klien serta memantau perbaikan internal. Data pada gambar memperlihatkan bahwa 60% responden menilai ESG *reporting* penting untuk meningkatkan reputasi dengan klien, 59% menyatakan hal ini sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, dan 39% menggunakannya untuk memantau peningkatan proses ESG. Fakta tersebut menegaskan bahwa investor tidak lagi hanya menilai kinerja finansial semata, tetapi juga menimbang faktor keberlanjutan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Lebih jauh, penerapan praktik ESG secara konsisten terbukti meningkatkan efisiensi operasional, loyalitas pelanggan, reputasi perusahaan, akses ke modal, serta mendorong inovasi yang pada akhirnya memperkuat kinerja keuangan jangka panjang (Rahi et al., 2022). Di Indonesia, urgensi implementasi ESG mendapat dukungan kuat dari regulator maupun pemerintah. Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan Indeks ESG *Leaders* IDX sebagai upaya mendorong emiten untuk menyusun laporan keberlanjutan (PwC, 2023). Komitmen ini

diperkuat melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Terbuka. Peraturan ini berfungsi sebagai kerangka hukum utama untuk mendukung implementasi dan pengawasan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) di tingkat nasional (OJK, 2017).

Sektor energi merupakan salah satu arena yang paling strategis untuk dikaji ketika membahas isu opini audit *Going Concern*. Sektor ini memiliki karakteristik yang unik: volatilitas harga komoditas global (Real Instituto Elcano, 2025), ketergantungan tinggi pada kebijakan pemerintah dan regulasi transisi energi (Zahari, 2023; IESR, 2024), serta tekanan besar untuk bertransisi menuju energi bersih dan rendah karbon (IESR, 2025). Kombinasi faktor-faktor tersebut menciptakan ketidakpastian yang signifikan terhadap kelangsungan usaha, sehingga perusahaan energi lebih rentan untuk mendapat opini audit *Going Concern* dibandingkan dengan sektor lainnya. Dalam konteks ini, peran dewan direksi dan pengungkapan ESG menjadi krusial. Dewan direksi berperan dalam mengarahkan strategi mitigasi risiko, memastikan kepatuhan terhadap regulasi keberlanjutan, dan mengawasi praktik tata kelola. Sementara itu, pengungkapan aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berfungsi sebagai alat transparansi yang dapat meningkatkan legitimasi suatu perusahaan di mata investor, regulator, dan auditor. Penelitian oleh Zhou et al. (2024) menunjukkan bahwa pengungkapan keberlanjutan terkait aspek lingkungan dan sosial memiliki korelasi positif dengan kinerja keuangan di sektor energi di negara-negara yang terlibat dalam *Belt and Road Initiative* (BRI), meskipun aspek tata kelola tidak memberikan kontribusi yang signifikan. Temuan ini mendukung pandangan bahwa pengungkapan informasi ESG dapat mempengaruhi pandangan auditor terhadap keberlanjutan operasional suatu perusahaan..

Adapun kejadian nyata yang berkaitan dengan penelitian ini. Di Indonesia, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) beberapa kali mendapatkan catatan auditor mengenai keraguan atas kelangsungan usaha (*Going Concern*) akibat beban utang besar dan fluktuasi harga batubara (Marketscreener, 2022; 2023). Upaya perusahaan untuk

melakukan restrukturisasi utang dan meningkatkan transparansi keberlanjutan menjadi bukti bahwa tata kelola dan keterbukaan ESG tidak dapat dipisahkan dari evaluasi auditor. Secara global, kasus Pacific Gas and Electric Company (PG&E) di Amerika Serikat menunjukkan dampak kegagalan tata kelola dan lemahnya pengelolaan risiko lingkungan. Perusahaan ini mengajukan kebangkrutan pada 2019 setelah menghadapi gugatan miliaran dolar akibat kebakaran hutan di California. Analisis Sustainalytics (2019) serta Hedstrom (2019) menegaskan bahwa kasus PG&E menjadi cermin bagaimana ketidakmampuan perusahaan energi dalam mengelola risiko ESG dapat memicu keraguan serius terhadap *Going Concern* meskipun memiliki skala usaha besar.

Meskipun fondasi keuangan umumnya dianggap sebagai dasar utama dalam mengeluarkan opini audit *Going Concern*, temuan penelitian terbaru menunjukkan bahwa auditor juga mempertimbangkan aspek non-keuangan, termasuk tata kelola korporasi dan tingkat pengungkapan keberlanjutan, dalam proses evaluasi. Beberapa studi membuktikan bahwa *sustainability disclosure* dapat meningkatkan legitimasi perusahaan dan memperkuat kinerja keuangan (Zhou et al., 2024), sementara penelitian lain justru menemukan bahwa implementasi ESG tertentu dapat menambah risiko *default* pada jangka pendek, khususnya di sektor energi yang tengah menjalani transisi hijau (Gao et al., 2025). Di sisi lain, karakteristik dewan direksi, seperti keragaman gender, independensi, dan keaktifan, terbukti berperan dalam mendorong pengungkapan ESG di berbagai negara berkembang (Alam & Nuhu, 2024). Namun, bukti empiris di Indonesia masih terbatas, riset Aida Sapitri, Siska Saputri (2025) memang menguji hubungan antara *sustainability disclosure* dan opini audit *Going Concern* pada perusahaan energi, tetapi belum melibatkan variabel dewan direksi sebagai faktor tata kelola yang berpotensi memperkuat transparansi. Selain itu, penelitian mengenai efektivitas dewan dan komite audit terhadap opini *Going Concern* di Indonesia juga menunjukkan hasil yang beragam (Prihantini et al., 2025). Ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian, terutama dalam mengkaji pengaruh secara simultan karakteristik dewan direksi dan pengungkapan ESG terhadap opini

audit *Going Concern* pada perusahaan sektor energi di Indonesia, yang memiliki tingkat risiko sistemik tinggi serta berada dalam tekanan regulasi keberlanjutan.

Ketidakkonsistenan temuan penelitian terkait pengaruh Dewan Direksi dan pengungkapan ESG terhadap opini audit *Going Concern* mengindikasikan adanya faktor-faktor kontekstual yang berpotensi memengaruhi kekuatan hubungan antarvariabel tersebut. Salah satu faktor yang paling relevan adalah umur perusahaan (*firm age*) sebagai proksi kedewasaan perusahaan (*firm maturity*). Berdasarkan *Organizational Life Cycle Theory* (Dickinson, 2011), perusahaan melalui tahapan siklus hidup yang memengaruhi strategi bisnis, struktur tata kelola, dan risiko keberlangsungan. Perusahaan yang telah matang cenderung memiliki sistem pengendalian internal yang lebih mapan, mekanisme tata kelola yang stabil, serta reputasi yang lebih kuat di mata auditor dan investor, sehingga implementasi Dewan Direksi dan ESG dapat berjalan lebih efektif (Hu, Li, & Tian, 2013). Sebaliknya, perusahaan yang relatif muda sering menghadapi keterbatasan sumber daya, ketidakstabilan struktur organisasi, dan kapasitas pengungkapan yang terbatas, sehingga penerapan GCG dan ESG belum tentu mampu menekan risiko *Going Concern* (Islam, 2025; Li et al., 2025). Dalam konteks tersebut, umur perusahaan dapat berperan sebagai variabel moderasi yang menjelaskan ketidakkonsistenan pengaruh Dewan Direksi dan pengungkapan ESG terhadap opini audit *Going Concern*. Selain itu, variabel umur perusahaan relatif mudah untuk diukur dan dioperasionalisasikan dalam penelitian empiris, baik dari sisi tahun sejak berdiri maupun sejak *go public*, dan telah banyak digunakan dalam penelitian akuntansi dan keuangan di Indonesia untuk menjelaskan perbedaan kedewasaan organisasi (Supramono & Nur Listiani, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengambil judul “**Pengaruh Dewan Direksi dan Pengungkapan ESG terhadap Opini Audit *Going Concern*, dengan Umur Perusahaan sebagai Pemoderasi**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Dewan Direksi memiliki pengaruh terhadap opini audit *Going Concern*?
2. Apakah pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berpengaruh terhadap opini audit *Going Concern*?
3. Apakah umur perusahaan berperan dalam memoderasi pengaruh Dewan Direksi terhadap opini audit *Going Concern*?
4. Apakah umur perusahaan memoderasi pengaruh pengungkapan ESG terhadap opini audit *Going Concern*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Dewan Direksi terhadap opini audit *Going Concern*.
2. Menganalisis pengaruh pengungkapan ESG terhadap opini audit *Going Concern*.
3. Meneliti peran umur perusahaan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara Dewan Direksi dan opini audit *Going Concern*.
4. Meneliti peran umur perusahaan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara pengungkapan ESG dan opini audit *Going Concern*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur di bidang audit dan tata kelola perusahaan, khususnya terkait determinan opini audit *Going Concern* pada perusahaan sektor energi di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lanjutan dengan fokus pada peran variabel moderasi kedewasaan perusahaan.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Auditor: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi auditor dalam mempertimbangkan faktor Dewan Direksi, ESG, dan umur perusahaan sebagai bahan evaluasi risiko keberlanjutan usaha klien.
- b) Bagi Manajemen Perusahaan: Penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen perusahaan untuk lebih memahami pentingnya penerapan Dewan Direksi dan ESG yang efektif agar dapat menjaga keberlangsungan usaha serta meningkatkan kepercayaan investor dan kreditor.
- c) Bagi Regulator: Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi regulator dalam merumuskan kebijakan yang mendukung penerapan praktik tata kelola perusahaan dan pelaporan keberlanjutan yang lebih optimal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori Agensi (*Agency Theory*) merupakan kerangka konseptual fundamental dalam menjelaskan hubungan kontraktual yang kompleks antara berbagai pihak dalam suatu organisasi, terutama antara pemilik dan manajemen perusahaan. Teori ini diformulasikan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling dalam karya seminal mereka pada tahun 1976, "*Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*" (Jensen & Meckling, 1976). Inti dari teori ini terletak pada hubungan di mana satu atau lebih pihak utama (*principal*), yang mendelegasikan wewenang, melibatkan satu atau lebih pihak pelaksana (*agent*), yang diberi amanat untuk bertindak atas nama *principal* guna menjalankan suatu layanan. Dalam hubungan ini, pendelegasian otoritas pengambilan keputusan merupakan elemen integral yang mendasari interaksi antara kedua belah pihak. Dalam konteks struktur korporasi modern, pemegang saham berperan sebagai *principal*, yaitu individu atau entitas yang memiliki klaim residual atas aset dan arus kas perusahaan, serta berharap nilai investasi mereka dapat dimaksimalkan. Di sisi lain, manajemen (termasuk direksi dan eksekutif puncak) bertindak sebagai *agent*, yang ditugaskan untuk mengelola operasional harian dan mengambil keputusan strategis atas nama *principal*. Hubungan ini muncul karena *principal* mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* untuk melaksanakan tugas demi kepentingan *principal* (Siagian, 2011).

Fenomena pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian (*separation of ownership and control*) adalah ciri khas perusahaan modern yang mendasari munculnya Teori Agensi. Adolphe Berle dan Gardiner Means (1932), yang pemikirannya banyak dikutip dalam berbagai literatur termasuk oleh Jensen dan

Meckling (1976) dan Majalah Maya KSAP (2020), telah menyoroti bahwa di perusahaan publik modern, pengendalian korporasi cenderung beralih ke tangan direksi. Hal ini mengurangi peran aktif pemegang saham dan menyerahkan pengendalian entitas kepada direksi. Kondisi ini menciptakan lingkungan di mana tujuan pribadi *agent* dan *principal* mungkin tidak selalu selaras, bahkan dapat berlawanan. Problematika utama dalam Teori Agensi adalah munculnya konflik kepentingan (*agency conflict*) yang inheren dalam hubungan *principal-agent*. Konflik dalam hubungan *principal-agent* muncul akibat perbedaan tujuan, preferensi, dan insentif antara kedua pihak, yang diperburuk oleh adanya asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi ketika *agent* memiliki pengetahuan yang lebih mendalam dan unggul mengenai operasional internal serta prospek perusahaan dibandingkan dengan *principal* yang memiliki keterbatasan akses informasi (Scott, 2015). Dalam kondisi ini, *agent* berpotensi untuk bertindak secara oportunistik, yaitu membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri atau manajemen, bahkan jika tindakan tersebut berisiko merugikan kepentingan *principal*. Perilaku oportunistik ini dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti pengalokasian sumber daya perusahaan untuk keuntungan pribadi manajer (misalnya, perquisites yang berlebihan), menghindari proyek berisiko tinggi yang menguntungkan tetapi membutuhkan usaha lebih, atau mengambil keputusan investasi yang suboptimal dari perspektif *principal*. Konflik semacam ini menunjukkan adanya divergensi sasaran (*goal divergence*) antara *principal* dan *agent* (Supriyono, 2018).

Akibat dari konflik kepentingan tersebut serta upaya untuk menguranginya, muncul konsep yang dikenal sebagai biaya agensi (*agency cost*). Jensen dan Meckling (1976, p. 308) mengklasifikasikan biaya agensi menjadi tiga komponen utama yang tidak dapat dihindari dalam hubungan keagenan:

- Biaya Pemantauan (*Monitoring Cost*): Ini adalah pengeluaran yang dilakukan oleh *principal* untuk mengamati, mengevaluasi, dan mengendalikan perilaku *agent* agar tetap sesuai dengan tujuan perusahaan dan kontrak yang telah disepakati. Biaya pemantauan dapat mencakup berbagai aktivitas, seperti biaya audit eksternal, penetapan sistem

pengendalian internal yang ketat, pembatasan anggaran, serta pengawasan aktif oleh dewan komisaris atau dewan pengawas. Tujuannya adalah untuk membatasi perilaku *agent* yang oportunistik dan memastikan bahwa keputusan yang diambil selaras dengan kepentingan *principal* (Jensen & Meckling, 1976).

- Biaya Ikatan (*Bonding Cost*): Merupakan biaya yang ditanggung oleh *agent* itu sendiri sebagai bentuk jaminan atau komitmen kepada *principal* bahwa ia tidak akan melakukan tindakan yang merugikan atau akan memberikan kompensasi jika tindakan merugikan tersebut terjadi. Contoh dari biaya ikatan meliputi biaya penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel (misalnya, melalui audit oleh akuntan publik), kepatuhan terhadap standar etika dan regulasi, serta penetapan insentif berbasis kinerja yang mengikat kepentingan *agent* dengan *principal* (Jensen & Meckling, 1976). Melalui biaya ikatan ini, *agent* berupaya mengurangi persepsi risiko yang dimiliki *principal* dan membangun kepercayaan.
- Kerugian Residual (*Residual Loss*): Meskipun *principal* telah mengeluarkan biaya pemantauan dan *agent* telah mengeluarkan biaya ikatan, tidak semua konflik kepentingan dapat dihilangkan secara sempurna. Kerugian residual adalah kerugian nilai atau penurunan kesejahteraan yang dialami oleh *principal* akibat adanya perbedaan keputusan *agent* dari keputusan optimal yang seharusnya memaksimalkan kesejahteraan *principal*, meskipun telah ada upaya pengawasan dan jaminan (Jensen & Meckling, 1976). Kerugian ini mencerminkan batas di mana biaya untuk menghilangkan konflik sepenuhnya akan melebihi manfaatnya, sehingga pada titik optimal, masih akan ada sedikit divergensi. Kerugian ini juga diartikan sebagai kerugian yang muncul akibat perbedaan kepentingan yang tidak sepenuhnya dapat dihilangkan meskipun pengawasan telah dilakukan (Ramadona, 2016).

Penting untuk dicatat bahwa, dalam pasar modal yang efisien, biaya agensi ini pada akhirnya akan ditanggung oleh *principal* (pemilik awal atau manajer-pemilik) dalam bentuk penurunan nilai kekayaan atau harga saham. Hal ini terjadi karena

investor eksternal yang rasional akan mengantisipasi biaya-biaya ini dan menyesuaikan harga yang bersedia mereka bayar untuk klaim atas perusahaan. Oleh karena itu, manajer-pemilik memiliki insentif kuat untuk meminimalkan biaya agensi, karena manfaat dari pengurangan biaya tersebut akan kembali kepada mereka dalam bentuk peningkatan nilai kekayaan (Jensen & Meckling, 1976).

Dalam penelitian ini, Teori Agensi menjadi kerangka fundamental untuk menganalisis pengaruh Dewan Direksi dan Pengungkapan ESG terhadap Opini Audit *Going Concern*. Adanya konflik kepentingan dan asimetri informasi dalam hubungan keagenan dapat memengaruhi transparansi dan keandalan pelaporan keuangan, serta memicu tindakan manajemen yang berpotensi menimbulkan keraguan atas kelangsungan usaha perusahaan. Manajer (*agent*) mungkin termotivasi untuk melakukan tindakan demi profitabilitas perusahaan dan kepuasan pribadi, namun tanpa pengawasan yang memadai, hal ini dapat menimbulkan risiko etika dan reputasi yang merugikan *principal* (Prasetyo, 2020).

Mekanisme GCG, sebagai sebuah sistem tata kelola yang efektif, dirancang untuk menyelaraskan kepentingan *principal* dan *agent* serta mengurangi *agency cost*. Menurut Tjager et al. (2003, p. 45), GCG, khususnya melalui keberadaan komisaris independen, berfungsi sebagai penjaga kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya, serta mampu memberikan pengawasan yang efektif dan nasihat yang objektif kepada manajemen. Effendi (2016, p. 183) juga menjelaskan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris dari pihak luar yang memiliki kapasitas profesional, integritas, dan independensi dalam mengawasi jalannya perusahaan untuk memastikan manajemen beroperasi sesuai prinsip tata kelola yang baik. Kehadiran mereka secara signifikan dapat membatasi perilaku oportunistik manajemen dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan yang selaras dengan kepentingan pemegang saham dan keberlangsungan perusahaan. Efektivitas GCG menjadi lebih penting daripada sekadar pemisahan kepemilikan dan pengendalian untuk mencegah terulangnya skandal perusahaan (Majalah Maya KSAP, 2020).

Selain Dewan Direksi, Pengungkapan ESG (*Environmental, Social, and Governance*) juga dapat dipandang sebagai bentuk *bonding mechanism* atau sinyal positif yang diberikan oleh perusahaan kepada pasar dan pemangku kepentingan. Meskipun Teori Agensi berfokus pada hubungan *principal-agent* (umumnya pemegang saham-manajemen), kesadaran yang berkembang tentang tanggung jawab korporasi kepada pemangku kepentingan yang lebih luas (seperti masyarakat dan lingkungan) telah memperluas cakupan relevansi teori ini (Majalah Maya KSAP, 2020). Pengungkapan informasi ESG yang komprehensif mencerminkan komitmen manajemen terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya dapat meningkatkan reputasi perusahaan, mengurangi risiko non-finansial, dan membangun kepercayaan investor. Bagi auditor, perusahaan dengan tata kelola yang baik (tercermin dari Dewan Direksi) dan komitmen terhadap keberlanjutan (tercermin dari ESG) cenderung dianggap memiliki risiko operasional dan keuangan yang lebih rendah, sehingga dapat memengaruhi tingkat keyakinan auditor dalam menyampaikan opini audit, termasuk Opini Audit *Going Concern*. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang Teori Agensi menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana pengawasan yang efektif melalui GCG dan praktik keberlanjutan melalui ESG dapat memitigasi *agency problem*, mengurangi biaya agensi, dan pada akhirnya meningkatkan keyakinan auditor terhadap kelangsungan usaha perusahaan.

2.1.2 Teori Legitimasi

Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*) merupakan kerangka konseptual yang menjelaskan bahwa keberlangsungan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam menyesuaikan aktivitas, kinerja, dan pelaporannya dengan nilai, norma, dan ekspektasi masyarakat di lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Teori ini berangkat dari gagasan bahwa perusahaan tidak hanya entitas ekonomi yang mengejar keuntungan, tetapi juga bagian dari sistem sosial yang lebih luas, sehingga harus memperoleh penerimaan sosial agar dapat mempertahankan operasionalnya. Konsep legitimasi merujuk pada persepsi umum bahwa tindakan suatu entitas dianggap sesuai dengan sistem nilai yang dibangun

secara sosial, sehingga perusahaan memperoleh hak untuk menggunakan sumber daya yang tersedia di masyarakat (Cormier & Magnan, 2015).

Secara konseptual, Teori Legitimasi berkaitan erat dengan gagasan kontrak sosial antara perusahaan dan masyarakat. Kontrak sosial ini bersifat implisit, di mana perusahaan diharapkan menjalankan aktivitas yang tidak bertentangan dengan kepentingan publik serta memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan ekonomi dan sosial. Selama perusahaan mampu memenuhi ekspektasi tersebut, masyarakat akan memberikan dukungan berupa kepercayaan, legitimasi, dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Sebaliknya, ketika aktivitas perusahaan dipersepsikan tidak sesuai dengan nilai sosial yang berlaku, maka dapat muncul tekanan publik, penurunan reputasi, hingga risiko kehilangan legitimasi yang berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha perusahaan (Cormier & Magnan, 2015).

Salah satu konsep penting dalam Teori Legitimasi adalah kesenjangan legitimasi (*legitimacy gap*), yaitu kondisi ketika terdapat perbedaan antara persepsi masyarakat terhadap perilaku perusahaan dengan ekspektasi sosial yang berlaku. Kesenjangan ini muncul ketika aktivitas perusahaan dipandang tidak sejalan dengan nilai, norma, dan tuntutan pemangku kepentingan, misalnya terkait kerusakan lingkungan, rendahnya tanggung jawab sosial, atau praktik bisnis yang dinilai merugikan publik (Wirawati et al., 2020). Dalam konteks tersebut, perusahaan memiliki insentif kuat untuk menjalankan berbagai strategi legitimasi guna memulihkan atau mempertahankan penerimaan sosial, salah satunya melalui peningkatan transparansi informasi dan pengungkapan aktivitas tanggung jawab sosial serta keberlanjutan. Pengungkapan lingkungan dan sosial dipandang sebagai sarana untuk memperbaiki reputasi, memperoleh kembali kepercayaan, dan menunjukkan kepatuhan terhadap ekspektasi masyarakat, sehingga membantu perusahaan mempertahankan legitimasi dan pada akhirnya mendukung peningkatan kinerja maupun nilai perusahaan (Permana & Tjahjadi, 2020; Wirawati et al., 2020).

Dalam konteks pelaporan perusahaan modern, pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dipandang sebagai salah satu instrumen utama dalam memperoleh dan mempertahankan legitimasi. Pengungkapan ESG berfungsi sebagai sarana komunikasi perusahaan kepada pemangku kepentingan mengenai komitmen terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan, tanggung jawab sosial, serta tata kelola yang baik. Melalui pelaporan tersebut, perusahaan berupaya menunjukkan bahwa aktivitasnya selaras dengan isu-isu publik seperti perubahan iklim, kesejahteraan sosial, dan etika bisnis, sehingga dapat memperkuat reputasi dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan (Lee & Raschke, 2023). Penelitian empiris juga menunjukkan bahwa pengungkapan lingkungan yang lebih luas dapat meningkatkan kualitas konteks informasi bagi pengguna laporan serta memperkuat persepsi legitimasi perusahaan di mata pemangku kepentingan non-keuangan (Cormier & Magnan, 2015). Namun demikian, Teori Legitimasi juga menyoroti bahwa pengungkapan keberlanjutan tidak selalu mencerminkan perubahan substantif dalam praktik operasional perusahaan. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat menggunakan pelaporan ESG sebagai strategi simbolik untuk menonjolkan citra positif tanpa diikuti peningkatan kinerja yang sepadan, yang dikenal sebagai *greenwashing*. Literatur menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja ESG yang relatif lemah justru memiliki insentif lebih besar untuk melakukan pengungkapan selektif guna memperbaiki persepsi pasar dan menarik dukungan investor (Lee & Raschke, 2023; Nurpatwikanto et al., 2025). Kondisi ini menyebabkan informasi ESG tidak selalu menjadi indikator yang kuat dalam menilai kondisi fundamental perusahaan, terutama dari perspektif risiko keberlangsungan usaha.

Dalam kerangka tata kelola perusahaan, Teori Legitimasi juga menempatkan dewan direksi sebagai aktor penting dalam merancang dan mengimplementasikan strategi legitimasi organisasi. Dewan direksi berperan dalam menentukan kebijakan tata kelola, pengelolaan risiko, serta arah pengungkapan informasi perusahaan, termasuk ESG. Karakteristik dewan direksi, seperti ukuran, kompetensi, dan aktivitas pengawasan, dapat memengaruhi luasnya pengungkapan ESG sebagai respons terhadap tekanan pasar dan regulator (Jimantoro et al., 2023; Seow, 2023).

Dengan demikian, dewan direksi tidak hanya berperan dalam aspek finansial perusahaan, tetapi juga dalam pengelolaan legitimasi melalui kebijakan tata kelola dan pelaporan keberlanjutan. Relevansi Teori Legitimasi menjadi semakin penting pada perusahaan sektor energi, karena aktivitas industri ini memiliki dampak lingkungan dan sosial yang besar serta berada dalam pengawasan publik yang lebih ketat dibanding sektor lainnya. Perusahaan energi menghadapi tekanan legitimasi yang tinggi terkait isu perubahan iklim, emisi karbon, dan eksploitasi sumber daya alam, sehingga peningkatan pengungkapan ESG sering digunakan sebagai strategi untuk mempertahankan penerimaan sosial dan kepercayaan pemangku kepentingan. Namun, apabila pengungkapan tersebut tidak diikuti dengan perbaikan kondisi fundamental perusahaan, legitimasi yang terbentuk dapat menjadi rapuh dan tidak mampu mengurangi persepsi risiko secara nyata.

Dalam konteks audit, opini audit *Going Concern* dapat dipandang sebagai indikator bahwa auditor meragukan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Dari perspektif legitimasi, kondisi ini dapat diartikan sebagai ancaman terhadap legitimasi ekonomi perusahaan, karena keraguan terhadap keberlangsungan usaha berpotensi menurunkan kepercayaan investor, kreditor, dan pasar. Oleh karena itu, perusahaan memiliki insentif untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan transparansi informasi, termasuk pengungkapan ESG, guna mempertahankan legitimasi di mata pemangku kepentingan dan auditor. Dalam penelitian ini, Teori Legitimasi digunakan untuk menjelaskan bagaimana Dewan Direksi dan Pengungkapan ESG dapat memengaruhi persepsi risiko dan kredibilitas perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga berpotensi memengaruhi keyakinan auditor dalam memberikan opini audit *Going Concern*.

Selain faktor tata kelola dan pengungkapan keberlanjutan, Teori Legitimasi juga dapat dikaitkan dengan umur perusahaan sebagai indikator akumulasi legitimasi yang dimiliki organisasi. Perusahaan yang telah beroperasi lebih lama umumnya memiliki rekam jejak yang lebih panjang dalam memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan, hubungan yang lebih mapan dengan regulator dan investor, serta

reputasi yang lebih stabil dibandingkan perusahaan yang relatif baru. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih tua memiliki apa yang dapat disebut sebagai “modal legitimasi” (legitimacy capital), yaitu tingkat penerimaan sosial yang terbentuk melalui pengalaman historis dan konsistensi kinerja dalam jangka waktu yang panjang. Modal legitimasi tersebut dapat membantu perusahaan menghadapi tekanan eksternal, termasuk persepsi risiko yang berkaitan dengan keberlangsungan usaha (Cormier & Magnan, 2015; Seow, 2023).

Namun demikian, perubahan tuntutan sosial dan regulasi yang semakin menekankan aspek keberlanjutan juga dapat menimbulkan tantangan bagi perusahaan yang telah lama beroperasi. Perusahaan yang gagal beradaptasi dengan standar ESG yang semakin tinggi berpotensi mengalami kesenjangan legitimasi, karena ekspektasi pemangku kepentingan terhadap perusahaan yang sudah mapan cenderung lebih besar dibandingkan perusahaan baru. Sebaliknya, perusahaan yang relatif muda sering kali memanfaatkan pengungkapan ESG secara lebih agresif sebagai strategi untuk membangun legitimasi awal dan menarik kepercayaan investor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa umur perusahaan dapat memengaruhi bagaimana tata kelola dan pengungkapan ESG dipersepsikan oleh pemangku kepentingan dalam konteks risiko keberlangsungan usaha.

Dalam penelitian ini, umur perusahaan diposisikan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara Dewan Direksi dan Pengungkapan ESG terhadap Opini Audit *Going Concern*. Perusahaan dengan umur yang lebih panjang cenderung memiliki sistem tata kelola yang lebih matang serta pengalaman yang lebih luas dalam mengelola risiko, sehingga pengaruh dewan direksi dan pengungkapan ESG terhadap persepsi auditor mengenai keberlangsungan usaha dapat berbeda dibandingkan perusahaan yang lebih muda. Dengan demikian, Teori Legitimasi memberikan landasan konseptual untuk menjelaskan bagaimana faktor umur perusahaan dapat memoderasi hubungan antara mekanisme tata kelola, transparansi keberlanjutan, dan opini audit *Going Concern* pada perusahaan sektor energi.

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Opini Audit *Going Concern*

Asumsi kelangsungan usaha (*Going Concern*) merupakan salah satu pilar fundamental dalam penyusunan laporan keuangan. Konsep ini mendasari keyakinan bahwa suatu perusahaan akan beroperasi "secara terus menerus" dan "melakukan kegiatan yang tak terbatas" meskipun dalam kenyataannya banyak perusahaan yang gagal setelah baru saja didirikan. Harahap (2012) juga menjelaskan *Going Concern* sebagai kontinuitas, yaitu asumsi bahwa perusahaan akan terus menjalankan bisnisnya hingga penyelesaian proyek, perjanjian, dan aktivitas yang sedang berlangsung, tanpa bermaksud untuk berhenti, menutup, atau dilikuidasi dalam periode waktu yang terbatas. Asumsi ini sangat vital karena memberikan dasar bagi penyusunan laporan keuangan historis dan proyeksi masa depan perusahaan, memungkinkan pengakuan aset berdasarkan biaya perolehan dan penyusutan selama masa manfaatnya, bukan nilai likuidasi. Menurut Rudianto (2012), laporan keuangan yang baik dan berkualitas akan memberikan informasi yang berguna dalam proses pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak terkait. Adapun penjelasan mengenai opini audit yang memiliki beberapa jenis perlu dipahami untuk memberikan konteks yang lebih komprehensif mengenai posisi opini audit *Going Concern* dalam praktik audit laporan keuangan. Opini audit merupakan pernyataan profesional auditor independen atas kewajaran penyajian laporan keuangan suatu entitas berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum. Opini ini menjadi hasil akhir dari proses audit yang sistematis dan menjadi dasar utama bagi para pemangku kepentingan dalam menilai kredibilitas informasi keuangan perusahaan. Dalam praktiknya, opini audit yang diberikan auditor tidak bersifat tunggal, melainkan terdiri atas beberapa jenis yang mencerminkan kondisi dan tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan.

- Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*), merupakan opini audit yang diberikan apabila auditor telah melaksanakan proses audit sesuai dengan standar auditing yang berlaku, tidak terdapat pembatasan dalam lingkup audit, serta laporan keuangan disajikan secara wajar dan konsisten sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Opini ini menunjukkan bahwa auditor tidak menemukan salah saji material maupun

kondisi lain yang memerlukan pengecualian atau modifikasi atas pendapatnya. Oleh karena itu, opini wajar tanpa pengecualian sering disebut sebagai *clean opinion* dan menjadi opini yang paling diharapkan oleh perusahaan maupun pemakai laporan keuangan (Setiyanti, 2012).

- Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelas (*Unqualified Opinion with Explanatory Language*), yaitu diberikan ketika laporan keuangan pada dasarnya telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, namun terdapat kondisi tertentu yang memerlukan penjelasan tambahan dari auditor. Penjelasan tersebut disampaikan dalam paragraf terpisah setelah paragraf pendapat. Kondisi yang dapat memerlukan bahasa penjelas antara lain adanya ketidakpastian material, perubahan prinsip akuntansi yang signifikan, atau keraguan auditor terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya (*Going Concern*). Meskipun demikian, keberadaan bahasa penjelas tidak mengubah kesimpulan auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar (Setiyanti, 2012).
- Opini Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*), menyatakan bahwa laporan keuangan secara umum telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak dari hal-hal tertentu yang dikecualikan. Opini ini diberikan apabila terdapat pembatasan lingkup audit atau penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum yang bersifat material, namun tidak pervasif sehingga tidak memengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Dengan demikian, pengecualian yang disampaikan auditor bersifat terbatas pada aspek tertentu dan tidak mencerminkan ketidakandalan laporan keuangan secara menyeluruh (Setiyanti, 2012).
- Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*), yaitu diberikan apabila auditor meyakini bahwa laporan keuangan mengandung salah saji material yang bersifat pervasif, sehingga laporan keuangan tidak menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam kondisi ini, auditor menyatakan secara tegas bahwa laporan keuangan tidak dapat dipercaya dan tidak layak

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi oleh para pemakai laporan keuangan (Setiyanti, 2012).

- Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*), yaitu dikeluarkan apabila auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk memberikan dasar yang memadai dalam menyatakan opini atas laporan keuangan. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh pembatasan ruang lingkup audit yang sangat signifikan atau adanya hubungan yang mengganggu independensi auditor. Dalam situasi tersebut, auditor tidak dapat menyimpulkan kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan, sehingga memilih untuk tidak menyatakan pendapat (Setiyanti, 2012).

Arfan Ikhsan (2022) dalam bukunya *Kepuasan Klien Dalam Perspektif Kualitas Audit dan Opini Audit Going Concern* secara spesifik membahas bagaimana kemampuan auditor dalam memahami kualitas audit memengaruhi pemberian opini *Going Concern*, yang pada akhirnya memengaruhi kepuasan klien. Mathius Tandiontong (2015) lebih lanjut mendefinisikan "kualitas audit" sebagai "probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien". Tujuan utama audit laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan opini mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam seluruh aspek yang material, mencakup posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas entitas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan keuangan yang telah melalui proses audit menjadi sumber informasi yang memiliki tingkat keandalan tinggi bagi investor dan kreditor dalam menilai prospek perusahaan, khususnya dalam pengambilan keputusan investasi maupun pemberian pinjaman. Hal ini disebabkan karena proses audit berperan dalam menurunkan tingkat risiko yang dihadapi investor dan kreditor, dengan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak didasarkan pada informasi yang berkualitas rendah. Auditor memiliki tanggung jawab profesional yang besar dalam mengevaluasi status *Going Concern* perusahaan. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Seksi 341 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2001), auditor wajib mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap

kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode yang pantas. Dalam SPAP SA 570 (2021) menyatakan bahwa terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan tentang kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya antara lain sebagai berikut:

a. Keuangan

- Posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersih.
- Pinjaman dengan waktu pengembalian tetap mendekati jatuh tempo tanpa prospek realistis untuk pembaruan atau pelunasan, atau pengendalian berlebihan pada pinjaman jangka pendek untuk mendanai aset jangka panjang.
- Indikasi penarikan dukungan keuangan oleh kreditur.
- Arus kas operasi negatif, yang diindikasikan oleh laporan keuangan historis.
- Rasio keuangan utama yang buruk.
- Kerugian operasi yang substansial atau penurunan signifikan dalam nilai aset penghasil arus kas./
- Dividen yang sudah lama terutang atau yang tidak berkelanjutan.
- Ketidakmampuan melunasi kreditur pada tanggal jatuh tempo.
- Ketidakmampuan mematuhi ketentuan perjanjian pinjaman.
- Perubahan transaksi dengan pemasok dari kredit menjadi tunai ketika pengiriman.
- Ketidakmampuan memperoleh pendanaan untuk pengembangan produk baru yang esensial atau investasi penting lainnya.

b. Operasi

- Intensi manajemen untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya.
- Hilangnya manajemen kunci tanpa penggantian.
- Hilangnya pasar utama, pelanggan utama, waralaba, lisensi, atau pemasok utama.
- Kesulitan tenaga kerja.
- Kekurangan penyediaan barang/bahan.
- Munculnya kompetitor yang sangat berhasil.

c. Lain-lain

- Ketidakpatuhan terhadap ketentuan permodalan atau ketentuan statutori/regulatori lainnya, misalnya ketentuan solvabilitas atau likuiditas bagi institusi keuangan.
- Perkara hukum yang dihadapi entitas yang jika berhasil dapat mengakibatkan tuntutan yang kemungkinan kecil dapat dipenuhi entitas.
- Perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang diperkirakan berdampak buruk bagi entitas.
- Kerusakan aset akibat bencana alam yang tidak diasuransikan atau kurang diasuransikan.

Menurut PSA No. 30 SA Seksi 341 ketika memberikan opini audit *Going Concern*, kondisi berikut dapat dipertimbangkan:

- Trend negatif, misalnya kerugian operasi berulang, kekurangan modal kerja, arus kas negatif dari kegiatan usaha, atau rasio keuangan penting yang buruk.
- Petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan, seperti kegagalan memenuhi kewajiban utang, penunggakan dividen, penolakan pemasok untuk transaksi kredit biasa, restrukturisasi utang, kebutuhan mencari pendanaan baru, atau penjualan sebagian besar aktiva.
- Masalah *intern*, contohnya pemogokan kerja, kesulitan hubungan perburuhan, ketergantungan besar pada proyek tertentu, komitmen jangka panjang yang tidak ekonomis, atau kebutuhan signifikan untuk memperbaiki operasi.
- Masalah *ekstern*, seperti gugatan hukum, keluarnya peraturan baru yang membahayakan kelangsungan usaha, kehilangan *franchise*, lisensi, atau paten penting, kehilangan pelanggan atau pemasok utama, kerugian akibat bencana besar (gempa bumi, banjir, kekeringan) yang tidak diasuransikan atau hanya ditanggung sebagian.

Arens (2008) menyebutkan bahwa auditor mempunyai tanggung jawab untuk mengevaluasi apakah perusahaan memiliki kemungkinan untuk tetap bertahan (*Going Concern*). Mathius Tandiontong (2015) menegaskan bahwa auditor dituntut untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama dalam setiap tahapan audit, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, untuk memastikan opini yang dihasilkan bebas dari bias dan sesuai dengan standar yang berlaku. Ikatan Akuntan Indonesia (2001, PSA No. 30) memberikan pedoman bagi auditor dalam memberikan opini audit *Going Concern*, termasuk skenario di mana manajemen tidak memiliki rencana yang efektif atau tidak mengungkapkan informasi yang memadai, yang dapat berujung pada opini tidak memberikan pendapat atau opini wajar dengan pengecualian dengan paragraf penekanan. Opini audit yang dikeluarkan oleh auditor mencerminkan hasil evaluasi auditor terhadap tingkat risiko perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, yang dapat menjadi indikasi adanya potensi kebangkrutan.

Dalam penelitian ini, Opini Audit *Going Concern* akan diidentifikasi dan diukur sebagai variabel dependen. Pengukuran variabel ini umumnya dilakukan dengan menggunakan variabel dummy, di mana perusahaan yang memperoleh opini audit *Going Concern* diberi nilai 1, sedangkan perusahaan yang tidak memperoleh opini audit *Going Concern* (seperti perusahaan yang menerima opini wajar tanpa pengecualian tanpa paragraf penekanan terkait *Going Concern* atau opini tanpa modifikasi lainnya) diberi nilai 0. Pendekatan tersebut memungkinkan dilakukannya analisis secara kuantitatif terhadap berbagai faktor yang memengaruhi pertimbangan auditor dalam menentukan pemberian opini tersebut. Pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik serta faktor-faktor yang memengaruhi penerbitan opini audit *Going Concern* menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi peran mekanisme tata kelola perusahaan yang baik melalui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan komitmen terhadap keberlanjutan melalui pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam memberikan sinyal positif kepada auditor. Sinyal tersebut diharapkan dapat menurunkan probabilitas perusahaan menerima opini audit *Going Concern*,

khususnya pada perusahaan sektor energi yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap ketidakpastian pasar.

2.2.2 Tinjauan *Good Corporate Governance* (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) adalah seperangkat aturan yang mengatur dan mengendalikan perusahaan, berfokus pada hubungan antara pemegang saham, pengurus (manajemen), kreditor, pemerintah, karyawan, serta pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya terkait dengan hak dan kewajiban mereka (Komite Nasional Kebijakan *Governance* [KNKG], 2006). Menurut *World Bank*, *Corporate Governance* merupakan seperangkat standar dalam organisasi ekonomi yang mengatur perilaku pemilik, dewan direksi, dan manajemen perusahaan, sekaligus menjabarkan pembagian tugas, kewenangan, serta tanggung jawab masing-masing pihak terhadap investor. Lebih lanjut, Cooper dan Schindler (2006) menjelaskan bahwa GCG melibatkan pengambilan keputusan yang efektif melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, proses, kebijakan, dan struktur organisasi. Tujuan penerapan tata kelola perusahaan adalah untuk mewujudkan kegiatan usaha yang menguntungkan, efisien, dan efektif dalam pengelolaan risiko, serta tetap dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Sejalan dengan pandangan tersebut, Djamilah dan Surenggono (2017) menyatakan bahwa *corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku. Dari berbagai definisi ini, dapat disimpulkan bahwa GCG merupakan upaya perusahaan untuk membangun hubungan baik dengan pemangku kepentingan guna menciptakan nilai tambah, memastikan operasional yang profesional, dan keberlangsungan usaha yang baik.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) diyakini mampu mengurangi permasalahan keagenan, karena di dalamnya terdapat prinsip-prinsip yang mengatur hubungan yang harmonis serta menjamin terpenuhinya hak-hak seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Lima prinsip utama GCG

meliputi: transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Selain itu, tujuan utama diterapkannya GCG adalah untuk melindungi pemegang saham dari praktik manajemen yang tidak jujur dan tidak transparan (Sari et al., 2019). *Good Corporate Governance* (GCG) menekankan pentingnya pemenuhan hak pemegang saham dalam memperoleh informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan yang disajikan secara benar, akurat, dan tepat waktu. Selain itu, perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan informasi kinerja keuangan secara transparan.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan, sekaligus memperkuat daya saing perusahaan. Di tengah persaingan usaha yang semakin ketat, GCG menjadi krusial untuk memenangkan persaingan secara sehat dan beretika. GCG diharapkan menjadi nilai tambah berkelanjutan bagi pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap menghormati kepentingan pemangku kepentingan lainnya sesuai aturan dan norma yang berlaku. Dengan demikian, jelas bahwa GCG terkait erat dengan nilai perusahaan dan, secara implisit, kinerja keuangan perusahaan. Penerapan sistem *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif dapat memengaruhi tingkat probabilitas serta nilai perusahaan. Variabel GCG merupakan salah satu faktor penting yang berperan dalam memengaruhi kinerja keuangan perusahaan, sebagaimana telah didukung oleh temuan empiris dalam berbagai penelitian sebelumnya. Nurhidayah (2020) mengemukakan bahwa instansi dapat mengembangkan tata kelola perusahaan yang baik guna memaksimalkan kinerja organisasi. Penerapan prinsip GCG yang efektif akan mendorong aktivitas operasional perusahaan berjalan baik, yang pada akhirnya berdampak positif pada kinerja finansial maupun non-finansial perusahaan.

Penerapan GCG memiliki tujuan utama untuk memaksimalkan kinerja perusahaan dan mendorong pengelolaan yang profesional (Sari et al., 2019). Apabila GCG berjalan baik, akan terbentuk nilai tambah bagi semua pihak dalam perusahaan,

meningkatkan keberhasilan usaha, dan akuntabilitas perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, tujuan GCG dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Membangun dan mempertinggi citra perusahaan agar dipandang baik oleh investor.
2. Mencegah berbagai risiko yang timbul akibat pengelolaan perusahaan yang tidak baik.
3. Menjadi patokan dalam menjaga kepentingan para pemangku kepentingan.
4. Meningkatkan investasi nasional dan internasional.

Manfaat GCG bagi perusahaan sangat beragam, antara lain meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi biaya, dan menumbuhkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal (Lee & Suh, 2022). Salah satu tujuan perusahaan menerapkan GCG adalah meningkatkan kesejahteraan pemilik perusahaan (investor) melalui maksimalisasi kekayaan mereka. Menurut Ningsih dan Daniel Bagana (2022), beberapa manfaat GCG bagi perusahaan meliputi:

1. Mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan yang lebih efisien dan efektif, yang berkontribusi pada perkembangan ekonomi nasional.
2. Menarik modal investor dengan biaya relatif rendah, baik domestik maupun internasional, melalui penumbuhan kepercayaan investor dan kreditor.
3. Membantu pemilik perusahaan dalam pengelolaan, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan.
4. Membantu manajemen dan dewan direksi dalam memantau penggunaan aset perusahaan.
5. Membantu perusahaan mengurangi korupsi.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan, tujuan penerapan GCG adalah meningkatkan nilai dan profesionalisme perusahaan agar menarik investasi, sementara manfaatnya mencakup kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, serta pengurangan korupsi. Selanjutnya, GCG juga didukung oleh beberapa komponen utama yang berperan penting dalam implementasinya:

1. Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris Independen merupakan pihak eksternal yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mewakili kepentingan pemegang saham dalam pengambilan keputusan strategis yang

berkaitan dengan permodalan, sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen perusahaan. Istilah "independen" berarti bebas, tidak memihak, tidak di bawah tekanan, netral, objektif, jujur, dan tidak dalam posisi benturan kepentingan (Wendy & Harnida, 2020). Efektivitas dewan komisaris dipengaruhi oleh tiga elemen kunci: independensi, kompetensi, dan komitmen. Jumlah dewan komisaris independen yang disarankan adalah 20% dari total dewan komisaris yang berasal dari luar pemilik atau kalangan profesional. Menurut Wulandari & Muliarta (2019) dewan komisaris independen dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$DKI. = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Sumber: Wulandari & Muliarta, 2019

2. Dewan Direksi

Dewan Direksi adalah pimpinan perusahaan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan. Tugas mereka meliputi penetapan arah strategis, kebijakan operasional, dan memastikan tingkat kesehatan manajemen perusahaan (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2016). Mengacu pada Peraturan OJK Nomor 33 Tahun 2014, setiap perusahaan publik wajib memiliki minimal dua anggota Dewan Direksi, dan salah satunya ditetapkan sebagai direktur utama atau presiden direktur. Para anggota Direksi tersebut ditetapkan oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Direksi memiliki tanggung jawab untuk mengelola operasional bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap anggota direksi memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tanggung jawab masing-masing, namun seluruh pelaksanaan tugas tersebut tetap menjadi tanggung jawab kolektif guna menjamin efektivitas pengelolaan perusahaan. Direksi bertugas menjalankan kebijakan dan strategi yang disepakati dewan komisaris,

menjaga struktur organisasi, dan memastikan pendelegasian wewenang berjalan baik. Menurut Amyulianthy (2012) dalam Hidayat et al. (2023) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Ukuran\ Direksi = Jumlah\ Anggota\ Direksi$$

Sumber: Hidayat et al., 2023

3. Komite Audit

Komite Audit berperan dalam melakukan pengawasan terhadap efektivitas sistem pengendalian internal, termasuk pelaksanaan audit internal, proses audit eksternal, serta kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Keberadaan komite audit diharapkan mampu membatasi kecenderungan perilaku oportunistik manajemen, khususnya praktik manajemen laba, melalui pengawasan yang memadai atas laporan keuangan dan hasil audit eksternal. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta (BEJ) No. Kep-315/BEJ/06/2000, komite audit dibentuk oleh Dewan Komisaris perseroan, dengan anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Komite Audit bertanggung jawab mengendalikan laporan keuangan, audit eksternal, dan sistem pengendalian internal. Peran utamanya adalah membantu Dewan Komisaris dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan serta menciptakan disiplin dan kontrol untuk mengurangi kemungkinan perbedaan tata kelola perusahaan (Salsabila & Ardini, 2023).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan BAPEPAM No. KEP-643/BL/2012 mengatur independensi Komite Audit, yaitu:

1. Bukan anggota kantor akuntan publik, kantor hukum, atau entitas lain yang memberikan jasa audit atau penasihat kepada emiten/perusahaan publik selama enam bulan sebelum penunjukan.
2. Bukan orang yang dalam enam bulan sebelum dicalonkan Dewan Komisaris mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan emiten/perusahaan publik.

3. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten/perusahaan publik. Jika memperoleh saham karena peristiwa hukum, wajib mengalihkan dalam paling lama enam bulan.

Untuk tujuan penelitian atau analisis kuantitatif, efektivitas atau karakteristik komite audit sering kali perlu diukur secara spesifik. Dalam konteks ini, komite audit dapat diukur dengan rumus atau proksi sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Komite Audit} = \text{Jumlah Anggota Komite Audit}$$

Sumber: Hidayat et al., 2023

2.2.3 Tinjauan *Environmental, Social, Governance* (ESG)

Environmental, Social, and Governance (ESG) merupakan suatu kerangka kerja yang bersifat menyeluruh dan saling terintegrasi, yang digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mengelola berbagai risiko dan peluang terkait keberlanjutan usaha. Konsep ESG semakin dikenal luas sejak diperkenalkan melalui *The United Nations Principles for Responsible Investment* pada tahun 2006 (Boffo & Patalano, 2020; Nasdaq, 2019), di mana ESG mulai digunakan sebagai indikator penilaian kinerja non-keuangan di pasar modal (Meytasari, 2024). Kerangka ESG diimplementasikan dengan tujuan untuk mendukung penciptaan nilai jangka panjang melalui praktik bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dampak operasional perusahaan terhadap lingkungan, masyarakat, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Ridho et al., 2023). Pendekatan ini mencerminkan bahwa isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola dapat memengaruhi kinerja jangka panjang suatu entitas dan oleh karenanya, harus dipertimbangkan dalam keputusan investasi (Boffo & Patalano, 2020). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mendukung penerapan ESG dengan menerbitkan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Regulasi ini mendorong entitas untuk menyusun laporan keberlanjutan (*sustainability report*) sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keuangan berkelanjutan, dengan tujuan menjaga stabilitas dan inklusivitas perekonomian

melalui keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup (OJK, 2021). Secara umum, kerangka ESG terbagi menjadi tiga pilar utama:

1. Lingkungan (*Environmental*): Fokus pada bagaimana aktivitas perusahaan memengaruhi lingkungan alam. Komponen ini mencakup pengelolaan penggunaan energi, air, dan sumber daya lainnya, pengendalian emisi karbon, pengelolaan limbah, serta inovasi yang mendukung kelestarian lingkungan (Ridho et al., 2023). Dalam konteks pelaporan, Nasdaq (2019) mengidentifikasi metrik lingkungan seperti emisi gas rumah kaca (GHG), penggunaan energi, dan penggunaan air sebagai penentu utama kesehatan lingkungan perusahaan, yang sejalan dengan pengungkapan dalam GRI 300 (*Global Reporting Initiative*, 2021). Pergerakan menuju ekonomi rendah karbon membutuhkan perubahan signifikan di berbagai sektor ekonomi (Taskforce on Climate-related Financial Disclosures, 2017).
2. Sosial (*Social*): Berkaitan dengan cara perusahaan membangun hubungan dengan karyawan, komunitas, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Aspek ini mencakup kesehatan dan keselamatan kerja, kesetaraan hak, perlindungan hak asasi manusia, serta tanggung jawab sosial kepada masyarakat (Ridho et al., 2023). Isu-isu sosial seperti praktik ketenagakerjaan, hak asasi manusia, dan keterlibatan komunitas menjadi perhatian utama (Nasdaq, 2019), yang selaras dengan panduan dalam GRI 400 (*Global Reporting Initiative*, 2021).
3. Tata Kelola (*Governance*): Merujuk pada penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, yang meliputi struktur dewan direksi dan komisaris, hak-hak pemegang saham, transparansi pengambilan keputusan, kebijakan anti-korupsi, dan pelaporan keuangan yang akuntabel (Ridho et al., 2023). Nasdaq (2019) menekankan pentingnya independensi dewan, keragaman dewan, dan kebijakan anti-korupsi sebagai indikator tata kelola yang kuat, yang juga ditekankan dalam GRI 1 dan GRI 2 (*Global Reporting Initiative*, 2021).

Urgensi penerapan ESG semakin tinggi karena investor, pemerintah, dan publik kini semakin menuntut transparansi atas praktik bisnis yang berkelanjutan

(KADIN, 2023). Perusahaan yang memiliki kinerja ESG yang baik biasanya dianggap lebih mampu mengelola risiko non-finansial, memperluas akses pendanaan, serta memperkuat reputasi di mata pasar (Alareeni & Hamdan, 2020). Hal ini mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan jangka panjang sekaligus menurunkan risiko penilaian negatif, termasuk risiko penurunan opini audit *Going Concern*. Meningkatnya kesadaran akan dampak ekonomi dan finansial dari perubahan iklim juga menarik perhatian pada hubungan antara manajemen risiko iklim perusahaan dengan materialitas finansial (Boffo & Patalano, 2020).

Praktik ESG yang diterapkan secara konsisten dinilai dapat memengaruhi keyakinan auditor dalam memberikan opini audit *Going Concern*. Perusahaan dengan komitmen tinggi pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola biasanya memiliki manajemen risiko yang lebih matang, sehingga auditor akan menilai risiko kebangkrutan lebih rendah (Meytasari, 2024). Selain itu, pengungkapan ESG yang baik meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan menjaga kelangsungan usaha (*Going Concern*) (El Deeb et al., 2023). Meskipun demikian, terdapat pula pandangan yang menyatakan bahwa di pasar negara berkembang, aktivitas ESG mungkin justru menimbulkan beban biaya yang lebih besar bagi perusahaan, sehingga dapat berdampak negatif pada kinerja (Ruan & Liu, 2021).

Dalam penelitian ini, pengungkapan ESG diukur dengan menggunakan metode penghitungan skor pengungkapan berdasarkan standar *Global Reporting Initiative* (GRI) yang tersedia secara publik. Penggunaan GRI dipilih karena kerangka ini bersifat komprehensif, terstruktur, dan diakui secara internasional, sehingga memungkinkan pengungkapan yang transparan dan dapat dibandingkan antarperusahaan serta sektor (Pratama Institute, 2025; GRI, 2021). Selain itu, standar ini menekankan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pelaporan keberlanjutan, serta mendorong akuntabilitas perusahaan melalui transparansi dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang dihasilkannya (Nossadata, 2023; Lindungi Hutan, 2023). Dengan demikian, pengukuran ini didasarkan pada jumlah indikator GRI yang diungkapkan oleh perusahaan dalam

laporan keberlanjutan mereka. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi kuantitatif terhadap kualitas dan kelengkapan pengungkapan ESG perusahaan (Ghazali et al., 2020). Pengukuran untuk setiap pilar ESG berdasarkan GRI Standard 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pengungkapan Lingkungan (*Environmental Disclosure*): Diukur dengan membandingkan jumlah indikator lingkungan yang diungkapkan oleh perusahaan (dari standar seri GRI 300) dengan total indikator lingkungan yang relevan dalam standar GRI. Aspek lingkungan dalam seri GRI 300 mencakup 30 aspek pengungkapan, dan berdasarkan GRI Standar 2021, terdapat total 31 indikator yang relevan. Indikator ini mencakup, namun tidak terbatas pada, emisi GHG (Scope 1, 2, dan 3), penggunaan energi, dan penggunaan air (Nasdaq, 2019).

Table 2.1 Aspek Pengungkapan *Environmental* GRI 300

GRI 301: Material 2016
301-1 Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume
301-2 Material input dari daur ulang yang digunakan
301-3 Produk pemerolehan ulang dan material kemasannya
GRI 302: Energi 2016
302-1 Konsumsi energi dalam organisasi
302-2 Konsumsi energi di luar organisasi
302-3 Intensitas energi
302-4 Pengurangan konsumsi energi
302-5 Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa
GRI 303: Air dan Efluen 2018
303-1 Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama
303-2 Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air
303-3 Pengambilan air
303-4 Pembuangan air
303-5 Konsumsi air
GRI 304: Keanekaragaman Hayati 2016
304-1 Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman 8 hayati tinggi di luar kawasan lindung
304-2 Dampak signifikan dari aktivitas, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati
304-3 Habitat yang dilindungi atau direstorasi
304-4 Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi
GRI 305: Emisi 2016
305-1 Emisi GRK (Cakupan 1) langsung

305-2 Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung
305-3 Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya
305-4 Intensitas emisi GRK
305-5 Pengurangan emisi GRK
305-6 Emisi zat perusak ozon (ODS)
305-7 Nitrogen oksida (NOx), belerang oksida (SOx), dan emisi udara signifikan lainnya
GRI 306: Limbah 2020
306-1 Timbulan limbah dan dampak signifikan terkait limbah
306-2 Manajemen dampak signifikan terkait limbah
306-3 Timbulan limbah
306-4 Limbah yang dialihkan dari pembuangan akhir
306-5 Limbah yang dikirimkan ke pembuangan akhir
GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok 2016
308-1 Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan
308-2 Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil

Sumber : *Global Reporting Initiative* 2021, diolah penulis (2025)

Cara pengukurannya adalah dengan memberikan skor 1 jika item diungkapkan dan 0 jika tidak diungkapkan (Nisa et al., 2023; Ghazali et al., 2020). Rumus yang digunakan adalah:

$$Env. Disclosure = \frac{\text{Total Indikator Environment GRI 300}}{J. Indikator Lingkungan yang Diungkapkan} \times 100\%$$

Sumber: Nisa et al., 2023

2. Pengungkapan Sosial (*Social Disclosure*): Diukur dengan membandingkan jumlah indikator sosial yang diungkapkan oleh perusahaan (dari standar seri GRI 400) dengan total indikator sosial yang relevan dalam standar GRI. Untuk aspek sosial, seri GRI 400 dapat digunakan dengan total 34 indikator pengungkapan, dan berdasarkan GRI Standar 2021, terdapat total 36 indikator yang relevan. Indikator sosial meliputi rasio gaji berdasarkan gender, tingkat pergantian karyawan, keragaman gender, kebijakan non-diskriminasi, tingkat cedera, kebijakan kesehatan & keselamatan global, serta kebijakan pekerja anak & kerja paksa (Nasdaq, 2019).

Tabel 2.2 Aspek Pengungkapan Social GRI 400

GRI 401: Ketenagakerjaan atau Kepegawaian
401-1 Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan
401-2 Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan pada kurun waktu tertentu atau paruh waktu
401-3 Cuti melahirkan
GRI 402: Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen 2016
402-1 Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional
GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018
403-1 Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja
403-2 Pengungkapan, Pengidentifikasian bahaya, penilaian risiko, dan investigasi Insiden
403-3 Layanan kesehatan kerja
403-4 Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang kesehatan dan keselamatan kerja
403-5 Pelatihan pekerja mengenai kesehatan dan keselamatan kerja
403-6 Peningkatan kualitas kesehatan pekerja
403-7 Pencegahan dan mitigasi dampak-dampak kesehatan dan keselamatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis
403-8 Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja
403-9 Kecelakaan kerja
403-10 Penyakit Akibat Kerja
GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016
404-1 Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan
404-2 Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan
404-3 Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier
GRI 405: Keanekaragaman dan Peluang Setara 2016
405-1 Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan
405-2 Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki
GRI 406: Nondiskriminasi 2016
406-1 Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan
GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif 2016
407-1 Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko
GRI 408: Pekerja anak 2016
408-1 Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak
GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja 2016
409-1 Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja

GRI 410: Praktik Keamanan 2016
410-1 Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia
GRI 411: Hak Masyarakat Adat 2016
411-1 Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat
GRI 413: Masyarakat Setempat 2016
413-1 Operasi dengan keterlibatan masyarakat setempat, penilaian dampak, dan program pengembangan
413-2 Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat setempat
GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok 2016
414-1 Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial
414-2 Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
GRI 415: Kebijakan Publik 2016
415-1 Kontribusi politik
GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 2016
416-1 Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa
416-2 Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa
GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan 2016
417-1 Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa
417-2 Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa
417-3 Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran
GRI 418: Privasi Pelanggan 2016
418-1 Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan

Sumber : *Global Reporting Initiative* 2021, diolah penulis (2025)

Cara pengukurannya sama dengan pengungkapan lingkungan, yaitu dengan memberikan skor 1 jika item diungkapkan dan 0 jika tidak diungkapkan (Nisa et al., 2023; Ghazali et al., 2020). Rumus yang digunakan adalah:

$$Soc. Disclosure = \frac{\text{Total Indikator Sosial GRI 400}}{\text{Jumlah Indikator Sosial yang Diungkapkan}} \times 100\%$$

Sumber: Nisa et al., 2023

3. Pengungkapan Tata Kelola (*Governance Disclosure*): Diukur dengan membandingkan jumlah indikator tata kelola yang diungkapkan oleh perusahaan (dari standar GRI 2: Pengungkapan Umum 2021 dan standar terkait tata kelola lainnya) dengan total indikator tata kelola yang relevan dalam standar GRI. Aspek tata kelola dapat merujuk pada GRI 102 dengan

total indikator 56 item, atau GRI Standar 2021 dengan total 30 indikator, serta GRI G4 dengan total 56 indikator. Indikator tata kelola mencakup keragaman dewan, independensi dewan, insentif berbasis kinerja, perundingan kolektif, kode etik pemasok, kebijakan etika & anti-korupsi, privasi data, serta praktik pelaporan ESG (Nasdaq, 2019).

Tabel 2.3 Aspek Pengungkapan Governance GRI 102

1. Aspek: Organisasi dan praktik pelaporan
2-1 Rincian organisasi
2-2 Entitas yang dimasukkan dalam pelaporan keberlanjutan organisasi
2-3 Periode, frekuensi, dan titik kontak pelaporan
2-4 Penyajian kembali informasi
2-5 Penjaminan eksternal
2. Aspek: Aktivitas dan Pekerja
2-6 Aktivitas, rantai nilai, dan hubungan bisnis lainnya
2-7 Tenaga kerja
2-8 Pekerja yang bukan pekerja langsung
3. Aspek: Tata Kelola
2-9 Struktur dan komposisi tata kelola
2-10 Pencalonan dan pemilihan badan tata kelola tertinggi
2-11 Ketua badan tata kelola tertinggi
2-12 Peran badan tata kelola tertinggi dalam mengawasi manajemen dampak
2-13 Delegasi tanggung jawab untuk mengelola dampak
2-14 Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan
2-15 Konflik kepentingan
2-16 Komunikasi masalah penting
2-17 Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi
2-18 Evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi
2-19 Kebijakan remunerasi
2-20 Proses untuk menentukan remunerasi
2-21 Rasio kompensasi total tahunan
4. Aspek: Strategi, kebijakan, dan praktik
2-22 Pernyataan tentang strategi pembangunan berkelanjutan
2-23 Komitmen kebijakan
2-24 Menanamkan komitmen kebijakan
2-25 Proses untuk memperbaiki dampak negatif
2-26 Mekanisme untuk mencari nasihat dan mengemukakan masalah
2-27 Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
2-28 Asosiasi keanggotaan
5. Aspek: Strategi, kebijakan, dan praktik
2-29 Pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan
2-30 Perjanjian perundingan kolektif

Sumber : *Global Reporting Initiative 2021*, diolah penulis (2025)

Cara pengukurannya juga dengan memberikan skor 1 jika item diungkapkan dan 0 jika tidak diungkapkan (Nisa et al., 2023; Ghazali et al., 2020). Rumus yang digunakan adalah:

$$Gov. Disclosure = \frac{\text{Total Indikator Tata Kelola (GRI 2)}}{J. \text{Indikator Tata Kelola yang Diungkapkan}} \times 100\%$$

Sumber: Nisa et al., 2023

Setiap metrik yang diungkapkan akan diberi skor antara 0 hingga 1. Skor yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih baik dalam mengungkapkan informasi keberlanjutan, lebih proaktif dalam mengelola risiko ESG, dan memiliki tata kelola yang lebih kuat. Pendekatan ini dinilai valid karena datanya terstandarisasi melalui GRI, berbasis laporan publik (laporan keberlanjutan), serta dapat dibandingkan lintas industri dan waktu. Dengan demikian, dalam penelitian ini, variabel ESG Disclosure dioperasionalkan sebagai skor komposit dari ketiga pilar yang bersifat rasio, digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap opini audit *Going Concern* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024.

2.2.4 Tinjauan Umur Perusahaan

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan disebutkan bahwa “*Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan, maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia.*” (UU No. 8 Tahun 1997). Berdasarkan definisi ini, umur perusahaan dapat diartikan sebagai lamanya waktu suatu organisasi atau bentuk usaha beroperasi secara berkelanjutan dengan tujuan memperoleh laba. Secara teoritis, umur perusahaan juga sering digunakan untuk mencerminkan akumulasi pengalaman bisnis. (Widhiastuti & Putu Diah Kumalasari, 2022) menjelaskan bahwa semakin panjang umur perusahaan, semakin baik pula kemampuannya memanfaatkan pengalaman masa lalu untuk mendukung kinerja keuangan dan mempertahankan reputasi. Perusahaan yang telah lama berdiri

umumnya dipercaya oleh investor karena dianggap mampu menghasilkan laba yang stabil dan mengelola risiko bisnis dengan lebih baik. Hal ini sejalan dengan pandangan Hu et al. (2018) dalam Widyastuti et al. (2025) bahwa seiring pertumbuhan perusahaan, reputasi dan partisipasi dalam kegiatan tanggung jawab sosial juga dapat semakin melekat.

Lebih lanjut, Supramono dan Nur Listiani (2023) menyebutkan bahwa usia perusahaan biasanya diukur dari jangka waktu antara pendirian awal atau *go public* sampai waktu sekarang. Mereka mengklasifikasikan umur perusahaan menjadi tiga kategori, yaitu perusahaan muda (1–12 tahun), berumur menengah (13–26 tahun), dan berumur tua (27–37 tahun). Klasifikasi ini membantu menjelaskan perbedaan tingkat kematangan organisasi dalam memanfaatkan peluang bisnis. Dengan demikian, umur perusahaan dalam penelitian ini digunakan sebagai indikator kedewasaan perusahaan yang dapat memengaruhi kemampuan bertahan (*Going Concern*) serta pengambilan keputusan manajerial. Umur perusahaan diukur dengan selisih antara tahun penelitian dengan tahun berdirinya perusahaan, sebagaimana diatur dalam dokumen resmi perusahaan (UU No. 8 Tahun 1997) dan dipraktikkan oleh Supramono & Nur Listiani (2023). Rumus pengukurannya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Umur Perusahaan} = \text{Tahun Penelitian} - \text{Tahun Berdiri Perusahaan}$$

Sumber: Data diolah Peneliti, 2025

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap opini audit *Going Concern*

Asumsi kelangsungan usaha (*Going Concern*) merupakan prinsip fundamental dalam penyusunan laporan keuangan, yang mengindikasikan bahwa entitas akan terus beroperasi dalam jangka waktu yang dapat diperkirakan di masa mendatang (Widyastiwi et al., 2023). Auditor memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat keraguan signifikan terhadap kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya (Rusdiana, 2019). Dalam konteks penelitian ini, efektivitas pilar-pilar *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi

aspek yang perlu diperhatikan, dan salah satu pilar sentral yang memegang peranan vital adalah Dewan Direksi. Dewan Direksi adalah pimpinan perusahaan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh dalam pengelolaan operasional harian serta penetapan arah strategis perusahaan (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2016). Tugas mereka sangat luas, meliputi formulasi kebijakan operasional, pengelolaan risiko, dan penentuan strategi yang akan memastikan tingkat kesehatan manajemen perusahaan. Mereka bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran Dewan Direksi ini merupakan inti dari bagaimana GCG diimplementasikan dalam praktik sehari-hari, karena merekalah yang menjalankan roda organisasi dan menerjemahkan visi menjadi aksi nyata.

Dalam kerangka Teori Agensi yang diformulasikan oleh Jensen dan Meckling (1976), Dewan Direksi bertindak sebagai *agen* yang diberi amanat oleh pemegang saham (prinsipal) untuk mengelola perusahaan. Tujuan utama dari hubungan keagenan ini adalah untuk memaksimalkan nilai investasi prinsipal. Oleh karena itu, efektivitas dan integritas Dewan Direksi dalam menjalankan tugasnya secara langsung memengaruhi pencapaian tujuan ini. Dewan Direksi yang kompeten dan bertanggung jawab akan berusaha meminimalkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik. Mereka akan mengambil keputusan yang rasional dan efisien untuk memastikan perusahaan berjalan dengan baik, yang pada akhirnya menstabilkan kondisi keuangan dan operasional perusahaan, serta mengurangi *agency cost* (Jensen & Meckling, 1976). Beberapa kemampuan Dewan Direksi seperti, mengambil keputusan strategis yang tepat, menerapkan sistem pengendalian internal yang kuat, serta merespons dinamika pasar secara efektif merupakan faktor krusial bagi kelangsungan usaha perusahaan. Dewan Direksi yang menjalankan fungsinya secara transparan dan akuntabel mampu meminimalkan asimetri informasi dengan pihak eksternal, termasuk auditor, sesuai dengan prinsip Teori Keagenan (*Agency Theory*) yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976). Integritas dan profesionalisme Dewan Direksi (Purnamasari et al., 2020) berkontribusi pada penyajian laporan keuangan yang andal, stabilitas indikator kinerja operasional, serta kemampuan pengelolaan risiko yang lebih baik.

Seluruh aspek tersebut menjadi pertimbangan utama auditor dalam menilai kelangsungan usaha perusahaan (Dubelta et al., 2024). Auditor akan memberikan opini audit *Going Concern* apabila terdapat keraguan terhadap kemampuan perusahaan untuk bertahan, sementara mekanisme Dewan Direksi yang efektif dapat secara proaktif mengurangi keraguan tersebut melalui praktik manajemen risiko dan kinerja yang unggul (Ikhsan, 2018).

Secara empiris, meskipun artikel-artikel yang disediakan tidak selalu menguji "Dewan Direksi" sebagai variabel tunggal secara eksplisit terhadap opini audit *Going Concern*, peran Dewan Direksi adalah komponen sentral dan tidak terpisahkan dari efektivitas GCG secara keseluruhan. Dubelta, Kuntadi, dan Supaijo (2024) dalam studi literatur mereka menyimpulkan bahwa mekanisme *Corporate Governance* secara umum berpengaruh terhadap Opini Audit *Going Concern*. Ini secara implisit menyoroti kontribusi Dewan Direksi sebagai bagian integral dari mekanisme GCG yang efektif. Putri dan Utami (2020), dalam penelitian mereka mengenai pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan, menemukan bahwa penerapan GCG yang efektif dapat mendorong peningkatan kinerja finansial perusahaan, yang merupakan prasyarat penting untuk menjaga kelangsungan usaha. Hal ini secara logis menunjukkan bahwa Dewan Direksi yang efektif dalam menjalankan prinsip-prinsip GCG akan berkontribusi pada kinerja keuangan yang sehat, sehingga mengurangi kemungkinan menerima opini *Going Concern*.

Lebih lanjut, Purnamasari, Oktavia, dan Tubarad (2020) meneliti komponen-komponen GCG dan menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap opini *Going Concern*. Kepemilikan manajerial ini merefleksikan sejauh mana kepentingan manajemen (termasuk Dewan Direksi) selaras dengan kepentingan pemilik. Hasil ini mendukung gagasan bahwa ketika Dewan Direksi memiliki kepentingan yang kuat dalam perusahaan (misalnya melalui kepemilikan saham), mereka akan lebih termotivasi untuk menjaga kelangsungan perusahaan dan meningkatkan nilainya. Keputusan yang diambil oleh Dewan Direksi secara konsisten dan selaras ini akan membantu perusahaan

menghindari kondisi yang dapat memicu opini audit *Going Concern*. Sebaliknya, beberapa penelitian menunjukkan kompleksitas hubungan ini. Rusdiana (2019) menemukan bahwa ukuran perusahaan, yang dapat mencerminkan skala operasi dan struktur manajemen termasuk Dewan Direksi, tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap opini audit *Going Concern* secara parsial. Putri dan Nurlaela (2018) juga menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan. Inkonsistensi ini mungkin mengindikasikan bahwa hanya ukuran Dewan Direksi saja tidak cukup, melainkan kualitas, komposisi, dan fungsi spesifik dari Dewan Direksi yang lebih mendalamlah yang berperan. Namun, secara umum, konsensus teoritis menegaskan bahwa Dewan Direksi yang kompeten, independen, dan berintegritas tinggi merupakan indikator stabilitas manajemen dan kualitas informasi. Dewan Direksi yang berfungsi dengan optimal diharapkan mampu mencegah masalah finansial yang serius atau setidaknya mengidentifikasi dan mengelola risiko tersebut secara proaktif. Ini termasuk keputusan terkait pendanaan, investasi, dan strategi operasional yang bertujuan untuk menjaga solvabilitas dan likuiditas perusahaan. Dengan demikian, Dewan Direksi yang efektif akan mengurangi kemungkinan auditor menemukan kondisi atau peristiwa yang menimbulkan keraguan signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan, sehingga risiko penerbitan opini audit *Going Concern* menjadi lebih rendah. Oleh karena itu, berdasarkan Landasan teoritis dan bukti empiris yang telah dipaparkan, hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap opini audit *Going Concern*.

2.3.2 Pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berpengaruh negatif terhadap opini audit *Going Concern*

Pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) merefleksikan komitmen perusahaan terhadap aspek keberlanjutan, yang mencakup dampak lingkungan, tanggung jawab sosial, dan praktik tata kelola yang baik (Abundanti, 2018; Sutisna, 2020). Dalam konteks *Signaling Theory*, pengungkapan informasi yang lebih baik dan transparan mengenai aktivitas ESG perusahaan dapat menjadi sinyal positif bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya (Nurjannah, 2015; Sutisna, 2020). Perusahaan yang secara proaktif mengungkapkan kinerja ESG-nya

dianggap memiliki manajemen risiko non-finansial yang lebih baik, reputasi yang meningkat, dan potensi akses pendanaan yang lebih luas (Alareeni & Hamdan, 2020; Rengganis, 2019). Tingkat transparansi yang memadai berperan dalam menekan asimetri informasi antara manajemen dan pihak eksternal, sehingga membangun kepercayaan dan memberikan keyakinan atas kelangsungan usaha perusahaan.

Dalam konteks pemberian opini audit *Going Concern*, pengungkapan ESG yang komprehensif dapat memengaruhi persepsi auditor terhadap risiko kelangsungan usaha perusahaan. Auditor berkewajiban untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan keberlanjutan usaha perusahaan (Nurjannah, 2015; Widyastiwi et al., 2023). Perusahaan yang menerapkan praktik ESG yang kuat cenderung memiliki manajemen risiko yang lebih matang, termasuk dalam menghadapi tantangan lingkungan (seperti perubahan iklim dan emisi) maupun sosial (seperti hubungan karyawan dan komunitas) (Alareeni & Hamdan, 2020). Kemampuan manajemen dalam mengelola risiko-risiko ini secara efektif, yang ditunjukkan melalui pengungkapan ESG, dapat mengurangi keraguan auditor mengenai prospek kelangsungan usaha perusahaan. Dengan demikian, pengungkapan ESG dapat menjadi indikator stabilitas dan resiliensi perusahaan, yang akan dipertimbangkan auditor dalam memberikan opini.

Pengungkapan ESG yang tinggi juga dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan menarik investasi berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat memperkuat posisi keuangan perusahaan (Abundanti, 2018; Rengganis, 2019). Aliran modal dari investor yang berorientasi ESG dapat memberikan likuiditas tambahan dan stabilitas finansial, yang secara langsung mendukung kemampuan perusahaan untuk terus beroperasi (Rengganis, 2019). Selain itu, praktik ESG yang baik seringkali dikaitkan dengan efisiensi operasional dan pengurangan biaya jangka panjang, misalnya melalui pengurangan limbah atau efisiensi energi (Alareeni & Hamdan, 2020). Faktor-faktor ini secara kolektif akan mengurangi indikasi risiko finansial yang dapat memicu opini audit *Going Concern*.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara pengungkapan ESG dan opini audit *Going Concern*, meskipun dengan hasil yang bervariasi. Studi oleh Akbar dan Ridwan (2019) menunjukkan bahwa pengungkapan ESG berpengaruh negatif terhadap opini audit *Going Concern*, mengindikasikan bahwa perusahaan dengan pengungkapan ESG yang lebih tinggi cenderung lebih kecil kemungkinannya menerima opini *Going Concern*. Hal ini didukung oleh temuan yang menyatakan bahwa pengungkapan ESG berkorelasi positif dengan kinerja keuangan perusahaan (Abundanti, 2018; Rengganis, 2019; Sutisna, 2020), yang secara tidak langsung memperkuat posisi *Going Concern*.

Namun, ada juga penelitian yang menemukan bahwa pengaruh pengungkapan ESG terhadap opini audit *Going Concern* tidak selalu signifikan. Contohnya, Nurhayati, Astuti, dan Harimurti (2015) menemukan bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang terkait dengan aspek sosial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap opini audit *Going Concern*, meskipun dalam beberapa konteks CSR dapat meningkatkan profitabilitas. Beberapa peneliti berpendapat bahwa di pasar negara berkembang, aktivitas ESG mungkin justru menimbulkan beban biaya yang lebih besar bagi perusahaan, yang bisa berdampak negatif pada kinerja jangka pendek, dan ini mungkin memengaruhi pandangan auditor (Ruan & Liu, 2021). Inkonsistensi hasil ini dapat dijelaskan oleh perbedaan metodologi pengukuran ESG (misalnya, penggunaan data *rating* vs. *disclosure*), sektor industri yang diteliti, atau tahap perkembangan pasar modal di masing-masing negara. Meskipun demikian, dalam konteks perusahaan energi yang cenderung memiliki dampak lingkungan dan sosial yang signifikan, pengungkapan ESG yang transparan menjadi sangat relevan. Komitmen terhadap praktik ESG tidak hanya memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan tetapi juga berfungsi sebagai alat manajemen risiko strategis yang dapat meningkatkan kepercayaan auditor terhadap kelangsungan usaha perusahaan di tengah tantangan transisi energi dan isu keberlanjutan global. Oleh karena itu, berdasarkan argumentasi teoritis dan bukti empiris yang telah dipaparkan, hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H2: Pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berpengaruh negatif terhadap opini audit *Going Concern*.

2.3.3 Umur perusahaan memoderasi pengaruh Dewan Direksi terhadap opini audit *Going Concern*

Efektivitas Dewan Direksi dalam mengelola perusahaan merupakan faktor krusial yang memengaruhi keyakinan auditor terhadap kelangsungan usaha. Dewan Direksi, sebagai penggerak utama operasional dan strategis perusahaan, bertanggung jawab penuh atas keputusan-keputusan yang berdampak pada stabilitas finansial dan operasional (OJK, 2016). Kinerja Dewan Direksi yang optimal diharapkan dapat mengurangi risiko *Going Concern*. Namun, kemampuan Dewan Direksi untuk memengaruhi opini audit *Going Concern* ini tidak berdiri sendiri, melainkan dapat dimoderasi oleh umur perusahaan.

Umur perusahaan merefleksikan tingkat kematangan dan pengalaman perusahaan dalam menghadapi berbagai kondisi pasar dan tantangan bisnis (Soleman & Christiawan, 2018; Putri & Nurlaela, 2018). Perusahaan yang lebih tua cenderung telah memiliki struktur organisasi yang lebih mapan, sistem pengendalian internal yang teruji, dan reputasi yang lebih kuat di mata pemangku kepentingan (Putri & Nurlaela, 2018). Faktor-faktor ini secara inheren memperkuat kapasitas Dewan Direksi untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan secara lebih efektif. Pada perusahaan yang lebih tua, Dewan Direksi kemungkinan besar terdiri dari individu-individu yang lebih berpengalaman, memiliki jaringan yang luas, dan telah mengembangkan strategi mitigasi risiko yang adaptif. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi dan merespons potensi masalah *Going Concern* dengan lebih sigap. Sebaliknya, pada perusahaan yang lebih muda, meskipun Dewan Direksi telah dibentuk, efektivitasnya mungkin belum mencapai tingkat optimal. Mereka mungkin masih dalam tahap membangun sistem, reputasi, dan mengakumulasi pengalaman dalam menghadapi berbagai tekanan bisnis. Oleh karena itu, kemampuan Dewan Direksi untuk menekan risiko *Going Concern* akan lebih kuat pada perusahaan yang sudah matang dibandingkan dengan perusahaan baru. Umur perusahaan bertindak sebagai faktor pemoderasi, memperkuat hubungan negatif antara efektivitas Dewan Direksi dan probabilitas opini audit *Going Concern*.

Beberapa penelitian, meskipun tidak secara langsung menguji moderasi ini, telah menunjukkan bahwa umur perusahaan memiliki hubungan dengan opini audit. Soleman dan Christiawan (2018) serta Putri dan Nurlaela (2018) menemukan hasil yang bervariasi terkait pengaruh umur perusahaan terhadap opini audit *Going Concern* sebagai variabel independen, namun gagasan bahwa kematangan organisasi berperan penting dalam konteks tata kelola tetap relevan. Pada perusahaan yang lebih tua, auditor mungkin memiliki persepsi yang lebih positif terhadap kemampuan Dewan Direksi dalam menjaga kelangsungan usaha karena rekam jejak stabilitas dan adaptasi yang lebih panjang. Oleh karena itu, berdasarkan argumentasi teoritis yang didukung oleh temuan umum terkait karakteristik perusahaan yang matang, hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H3: Umur perusahaan memoderasi pengaruh Dewan Direksi terhadap opini audit *Going Concern*.

2.3.4 Umur perusahaan memoderasi pengaruh pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) terhadap opini audit *Going Concern*

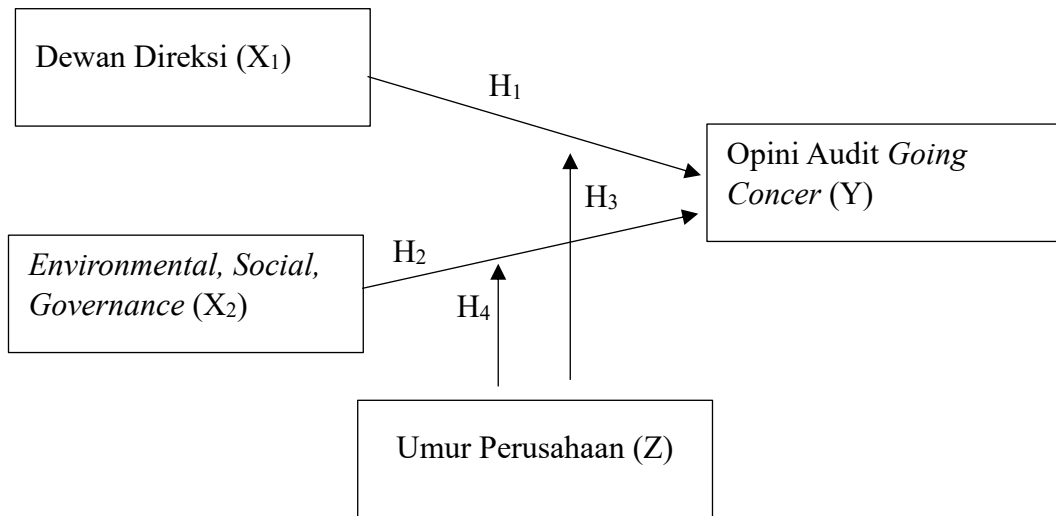
Pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) adalah sinyal penting bagi auditor dan pemangku kepentingan lainnya tentang komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan manajemen risiko non-finansial (Abundanti, 2018; Alareeni & Hamdan, 2020). Perusahaan yang transparan dalam praktik ESG cenderung memiliki reputasi yang lebih baik, akses pendanaan yang lebih luas, dan manajemen risiko yang lebih komprehensif, yang semuanya berkontribusi pada asumsi *Going Concern*. Namun, dampak pengungkapan ESG ini dapat dimoderasi oleh umur perusahaan. Perusahaan yang lebih tua memiliki keuntungan dalam hal implementasi dan pengungkapan ESG karena telah memiliki sumber daya yang lebih besar, pengalaman operasional yang lebih panjang, dan kesempatan untuk mengintegrasikan praktik ESG secara mendalam ke dalam strategi bisnis inti mereka (Putri & Lestari, 2019). Ini berarti pengungkapan ESG dari perusahaan yang lebih tua cenderung lebih kredibel dan substansial di mata auditor dibandingkan perusahaan yang lebih muda. Auditor mungkin akan lebih percaya pada komitmen ESG yang ditunjukkan oleh perusahaan dengan rekam jejak yang panjang, karena ini mengindikasikan bahwa praktik keberlanjutan

tersebut telah terbukti efektif dan bukan sekadar inisiatif baru. Selain itu, perusahaan yang lebih tua telah membangun hubungan yang lebih kuat dengan pemangku kepentingan dan memiliki pengalaman yang lebih kaya dalam mengelola risiko lingkungan dan sosial yang kompleks. Pengelolaan risiko ESG yang matang ini dapat mencegah potensi kerugian finansial atau reputasi yang dapat mengancam kelangsungan usaha. Sebaliknya, pada perusahaan yang lebih muda, meskipun berinisiatif dalam ESG, efektivitasnya mungkin belum terbukti secara jangka panjang, atau implementasinya belum sekomprehensif perusahaan yang lebih tua. Oleh karena itu, dampak positif pengungkapan ESG terhadap opini audit *Going Concern* akan lebih kuat terlihat pada perusahaan yang lebih tua karena kredibilitas dan integrasi praktik ESG yang lebih dalam.

Meskipun penelitian yang secara langsung menguji moderasi umur perusahaan terhadap hubungan ESG dan opini audit *Going Concern* masih berkembang, logika teoritis menunjukkan bahwa kematangan perusahaan memperkuat validitas sinyal dari pengungkapan ESG. Alareeni dan Hamdan (2020) menemukan bahwa faktor ESG memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas, dan efek ini lebih terasa pada perusahaan yang lebih besar (berkorelasi dengan umur yang lebih tua). Profitabilitas yang lebih baik secara tidak langsung mendukung posisi *Going Concern*. Oleh karena itu, berdasarkan argumentasi teoritis dan temuan empiris yang telah dipaparkan, hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H4: Umur perusahaan memoderasi pengaruh pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) terhadap opini audit *Going Concern*.

2.4 Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran pada penelitian ini menjelaskan hubungan Dewan Direksi dan Pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) terhadap Opini Audit *Going Concern*, dengan umur perusahaan sebagai variabel moderasi. Perusahaan yang menerapkan Dewan Direksi dengan baik diharapkan memiliki kualitas pelaporan keuangan serta pengelolaan risiko perusahaan, sehingga dapat menekan kemungkinan perusahaan memperoleh opini audit *Going Concern*. Demikian pula, perusahaan yang melakukan pengungkapan ESG secara transparan memberikan sinyal positif kepada auditor mengenai komitmen mereka terhadap keberlanjutan dan manajemen risiko non-finansial, yang juga diperkirakan dapat menurunkan probabilitas opini audit *Going Concern*. Namun, peran Dewan Direksi dan pengungkapan ESG ini tidak bersifat mutlak dan dapat dipengaruhi oleh umur perusahaan. Perusahaan dengan umur yang lebih matang cenderung memiliki sistem tata kelola dan praktik keberlanjutan yang lebih mapan, yang membuat pengaruh Dewan Direksi dan ESG terhadap keyakinan auditor menjadi lebih kuat. Sebaliknya, pada perusahaan yang lebih muda, dampak Dewan Direksi dan ESG mungkin belum sepenuhnya terlihat atau diakui oleh auditor.

2.5 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Wang, X., Song, X., & Sun, M. (2023)	Y: Opini Audit (<i>Modified Audit Opinion</i>) X: Kinerja ESG (<i>Environment, Social, Governance</i>) Z: Pengalaman Auditor (Moderator) Mediasi: Kualitas Pelaporan Keuangan	Penelitian ini menemukan bahwa semakin baik kinerja ESG perusahaan, semakin kecil kemungkinan auditor mengeluarkan opini audit termodifikasi. Pengalaman auditor berperan memoderasi pengaruh tersebut; auditor yang berpengalaman cenderung lebih mengandalkan keahlian profesional dibandingkan informasi ESG, sedangkan auditor kurang berpengalaman lebih bergantung pada informasi ESG. Selain itu, kualitas pelaporan keuangan memediasi hubungan ESG dan opini audit: kinerja ESG yang baik meningkatkan kualitas pelaporan, yang pada gilirannya menurunkan kemungkinan opini termodifikasi.
2.	Purnamasari, F. F., Oktavia, R., & Tubarad, C. P. T. (2020)	Y: Opini <i>Going Concern</i> X: Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen (proksi GCG)	Penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap opini <i>Going Concern</i> , mengindikasikan bahwa semakin besar kepemilikan saham oleh manajemen, semakin kecil kemungkinan perusahaan menerima opini <i>Going Concern</i> . Namun, kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap opini <i>Going Concern</i> .
3.	Putri, E., & Nurlaela, S. (2018)	Y: Opini Audit <i>Going Concern</i> X: Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Reputasi Auditor, Profitabilitas	Penelitian ini menunjukkan bahwa reputasi auditor (yang berafiliasi dengan KAP <i>Big Four</i>) berpengaruh positif signifikan terhadap opini audit <i>Going Concern</i> . Sebaliknya, ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap opini audit <i>Going Concern</i> .
4.	Pestaria, M. P., & Fitriani, I. (2023)	Y: Opini Audit <i>Going Concern</i> X: Reputasi KAP, <i>Opinion Shopping</i> , <i>Debt Default</i>	Penelitian ini menemukan bahwa reputasi KAP berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>Going Concern</i> , dan <i>opinion shopping</i> juga berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>Going Concern</i> . Namun,

			<i>debt default</i> tidak berpengaruh signifikan. Ketiga variabel secara simultan berpengaruh signifikan.
5.	Soleman, M. R., & Christiawan, Y. J. (2018)	Y: Opini Audit <i>Going Concern</i> X: Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Opini Audit Sebelumnya	Penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan opini audit sebelumnya tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit <i>Going Concern</i> . Sementara profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap opini audit <i>Going Concern</i> .
6.	Akbar, I. (2020)	Y: Kinerja Keuangan Perusahaan X: Pengungkapan <i>Environmental, Social, Governance</i> (ESG)	Penelitian ini menemukan bahwa pengungkapan <i>Environmental, Social, Governance</i> (ESG) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).
7.	Abundanti, S. L. A. (2018)	Y: Kinerja Keuangan Perusahaan X: Pengungkapan <i>Environmental, Social, Governance</i> (ESG)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan <i>Environmental, Social, Governance</i> (ESG) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.
8.	Ruan, L., & Liu, H. (2021)	Y: <i>Firm Performance</i> X: <i>Environmental, Social, Governance (ESG) Activities</i>	Penelitian ini menemukan bahwa aktivitas ESG perusahaan memiliki dampak negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan di Tiongkok, terutama untuk perusahaan non-BUMN dan non-sensitif lingkungan, karena adanya beban biaya.
9.	Alareeni, B. A., & Hamdan, A. (2020)	Y: <i>Corporate Financial Performance</i> (Profitabilitas, Risiko Finansial) X: <i>Environmental, Social, and Governance (ESG) Factors</i>	Penelitian ini menemukan pengaruh positif faktor ESG terhadap profitabilitas perusahaan, terutama pada perusahaan yang lebih besar. Faktor ESG umumnya memiliki pengaruh positif pada peringkat kredit. Tata kelola memiliki dampak paling signifikan di antara kategori ESG.
10.	Rengganis, M. (2019)	Y: Kinerja Keuangan Perusahaan X: Pengungkapan <i>Environmental, Social, dan Governance</i> (ESG)	Penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari pengungkapan ESG terhadap kinerja keuangan perusahaan di Indonesia.

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, yang bertujuan menguji secara empiris hubungan antarvariabel independen, moderasi, dan dependen secara empiris (Sugiyono, 2017). Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang telah tersedia dan dipublikasikan oleh pihak lain untuk tujuan selain penelitian ini, namun relevan untuk dianalisis (Sekaran & Bougie, 2020). Selanjutnya, data sekunder dalam penelitian ini berbentuk panel data, yaitu gabungan antara data *cross-section* (beberapa perusahaan sektor energi di Bursa Efek Indonesia) dan *time series* (periode 2020–2024). Menurut Baltagi (2005), panel data memberikan informasi yang lebih kaya karena mampu mengungkap dinamika antar unit sekaligus perubahan antar waktu. Dalam penelitian ini, setiap kombinasi perusahaan-tahun diperlakukan sebagai satu observasi, sehingga analisis dilakukan dengan pendekatan pooled logistic regression (Gujarati & Porter, 2009).

Data penelitian ini bersumber dari laporan keuangan tahunan (*Annual Report*), laporan keberlanjutan (*sustainability report*), serta laporan audit independen perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Seluruh data diperoleh dari situs resmi BEI (www.idx.co.id) serta dari situs resmi masing-masing perusahaan sampel, sehingga validitas dan keandalan data dapat terjamin.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sekaran & Bougie (2020), “*Populasi mengacu pada seluruh kelompok orang, peristiwa, dan hal-hal menarik yang ingin diteliti oleh peneliti*”. Pengambilan sampel pada penelitian ini berasal dari populasi perusahaan sektor

energi yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020 – 2024.

3.2.2 Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode pengamatan tahun 2020 hingga 2024. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel yang didasarkan pada pertimbangan dan kriteria tertentu yang dianggap relevan untuk mencapai tujuan penelitian (Sugiyono, 2017). Kriteria yang digunakan dalam proses pemilihan sampel dijabarkan sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berkelanjutan selama periode 2020–2024.
2. Perusahaan yang secara konsisten menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit secara berturut-turut selama periode 2020–2024.
3. Perusahaan yang secara berturut-turut menyusun dan mempublikasikan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) secara selama periode 2020–2024.
4. Perusahaan yang memiliki ketersediaan data lengkap terkait variabel *Good Corporate Governance* (terutama Dewan Direksi), Pengungkapan ESG (Lingkungan, Sosial, Tata Kelola), Opini Audit *Going Concern*, dan serta umur perusahaan selama periode penelitian.
5. Perusahaan yang memiliki opini audit yang tersedia secara publik selama periode penelitian (baik opini *Going Concern* maupun non-*Going Concern*).

Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sampel penelitian yang selanjutnya dijelaskan secara rinci pada tahapan seleksi sampel. Klasifikasi objek penelitian pada penelitian ini dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Rincian Perolehan Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020 sampai dengan 2024	94
2.	Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara tidak konsisten selama periode 2020 sampai dengan 2024	(26)
3.	Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data terkait variabel Dewan Direksi, Pengungkapan ESG, Opini Audit <i>Going Concern</i> , dan Umur Perusahaan selama periode 2020 sampai dengan 2024	(52)
4.	Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020 - 2024	94
Jumlah Perusahaan		15
Sampel Perusahaan x periode penelitian selama 5 tahun		75

Sumber: Data diolah, 2025

Dengan mengambil sampel perusahaan yang bergerak pada sektor energi maka erat kaitannya dengan pengoperasional yang baik dalam segi struktural dan perhatian yang lebih pada lingkungan. Berdasarkan kriteria pemilihan sampel yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan terdapat 15 sampel perusahaan yang akan diteliti. Dengan rentang penelitian lima tahun menjadikan sampel dari penelitian ini mencapai 75 sampel.

Tabel 3.2 Daftar Sampel Penelitian

No	Nama Perusahaan	Kode Saham
1	Alamtri Resources Indonesia Tbk	ADRO
2	Perusahaan Gas Negara Tbk	PGAS
3	Bukit Asam Tbk	PTBA
4	Indo Tambangraya Megah Tbk	ITMG
5	Bumi Resources Tbk	BUMI
6	Petrosea Tbk	PTRO
7	Medco Energi Internasional Tbk	MEDC
8	Indika Energi Tbk	INDY
9	AKR Corporindo Tbk	AKRA
10	Elnusa Tbk	ELSA
11	TBS Energi Utama Tbk	TOBA
12	Darma Henwa Tbk	DEWA
13	Delta Dunia Makmur Tbk	DOID
14	Dian Swastatika Sentosa Tbk	DSSA
15	Mitrabahtera Segara Sejati Tbk	MBSS

Sumber: Data diolah, 2025

3.3 Definisi Operasional Variabel

Perumusan definisi operasional variabel bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai cara pengukuran masing-masing variabel dalam penelitian ini secara kuantitatif. Penelitian ini melibatkan satu variabel dependen, dua variabel independen, serta satu variabel moderasi, yang penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

1. Opini Audit *Going Concern* (Variabel Dependen – Y)

Opini audit *Going Concern* adalah opini audit modifikasi yang diberikan oleh auditor ketika terdapat keraguan signifikan mengenai kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya (Rusdiana, 2019; Widyastiwi et al., 2023). Dalam penelitian ini, variabel tersebut dioperasionalkan menggunakan variabel dummy. Perusahaan yang menerima opini audit *Going Concern* (termasuk opini wajar disertai pengecualian dengan paragraf penekanan, opini tidak wajar, atau pernyataan tidak memberikan pendapat terkait *Going Concern*) akan diberi kode 1, sedangkan perusahaan yang tidak menerima opini audit *Going Concern* (misalnya, menerima opini wajar tanpa pengecualian tanpa paragraf penekanan *Going Concern* atau opini tanpa modifikasi lainnya) akan diberi kode 0.

2. Dewan Direksi (Variabel Independen 1 – X1)

Good Corporate Governance (GCG) adalah seperangkat aturan dan sistem yang mengatur hubungan antarpihak dalam perusahaan untuk memastikan pengelolaan yang profesional dan akuntabel (Purnamasari et al., 2020). Dalam penelitian ini, Dewan Direksi akan digunakan sebagai proksi utama untuk mengukur *Good Corporate Governance*. Pemilihan Dewan Direksi sebagai representasi GCG didasarkan pada argumen kuat mengenai peran sentralnya dalam manajemen strategis dan operasional perusahaan, yang secara langsung memengaruhi kelangsungan usaha. Diukur dengan rumus:

$$\text{Ukuran Direksi} = \text{Jumlah Anggota Direksi}$$

3. Pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) (Variabel Independen 2 – X2)

Pengungkapan ESG adalah praktik perusahaan dalam menyajikan informasi mengenai kinerja dan dampak mereka di bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Abundanti, 2018; Alareeni & Hamdan, 2020). Dalam penelitian ini, pengungkapan ESG akan diukur menggunakan metode penghitungan skor pengungkapan berdasarkan standar *Global Reporting Initiative* (GRI) Standar 2021 yang tersedia secara publik, dengan memberikan skor 1 untuk item yang diungkapkan dan skor 0 untuk item yang tidak diungkapkan (Ghazali et al., 2020; Nisa et al., 2023).

- Pengungkapan Lingkungan (*Environmental Disclosure*): Diukur dengan membandingkan jumlah indikator lingkungan yang diungkapkan perusahaan (dari standar seri GRI 300) dengan total indikator yang relevan. Aspek lingkungan dalam seri GRI 300 mencakup 30 aspek pengungkapan, dan berdasarkan GRI Standar 2021, terdapat total 31 indikator yang relevan.
- Pengungkapan Sosial (*Social Disclosure*): Diukur dengan membandingkan jumlah indikator sosial yang diungkapkan perusahaan (dari standar seri GRI 400) dengan total indikator yang relevan. Untuk aspek sosial, seri GRI 400 dapat digunakan dengan total 34 indikator pengungkapan, dan berdasarkan GRI Standar 2021, terdapat total 36 indikator yang relevan.
- Pengungkapan Tata Kelola (*Governance Disclosure*): Diukur dengan membandingkan jumlah indikator tata kelola yang diungkapkan perusahaan (dari standar GRI 2: Pengungkapan Umum 2021 dan standar terkait tata kelola lainnya) dengan total indikator yang relevan. Aspek tata kelola dapat merujuk pada GRI 102 dengan total indikator 56 item, atau GRI Standar 2021 dengan total 30 indikator, serta GRI G4 dengan total 56 indikator.
- Skor Komposit ESG: Skor komposit ESG akan dihitung sebagai rata-rata atau penjumlahan dari skor Pengungkapan Lingkungan, Pengungkapan Sosial, dan Pengungkapan Tata Kelola. Skor yang lebih tinggi menunjukkan kualitas pengungkapan ESG yang lebih baik.

4. Umur Perusahaan (Variabel Moderasi – Z)

Umur perusahaan adalah durasi waktu sejak perusahaan didirikan atau mulai beroperasi secara komersial hingga periode penelitian (Soleman & Christiawan, 2018; Putri & Nurlaela, 2018). Variabel ini mencerminkan tingkat kematangan, pengalaman, dan stabilitas perusahaan. Umur perusahaan akan memoderasi hubungan antara GCG dan Pengungkapan ESG terhadap opini audit *Going Concern*. Pengukuran variabel ini dilakukan dengan menghitung selisih antara tahun penelitian dengan tahun berdirinya perusahaan.

$$\text{Umur Perusahaan} = \text{Tahun Penelitian} - \text{Tahun Berdiri Perusahaan}$$

3.4 Metode Pengambilan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Menurut Sekaran & Bougie (2020), “*Secondary data are data that have been collected by others for another purpose than the purpose of the current study*” dimana data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh orang lain untuk tujuan lain dari tujuan penelitian saat ini”. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dilakukan melalui studi dokumen, yakni data diperoleh dari dokumen-dokumen yang telah tersedia. Sumber data utama berupa data sekunder, meliputi laporan keberlanjutan perusahaan sampel, laporan audit dari auditor independen, serta informasi lain yang relevan dengan variabel yang diteliti. Selain itu, data pendukung diperoleh melalui kajian literatur, termasuk buku-buku, jurnal ilmiah, dan sumber daring. Data diperoleh dari www.idx.co.id berupa laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*), laporan keuangan dan laporan audit oleh laporan auditor *independent* mengenai perusahaan sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2022-2024.

3.5 Metode Analisis Data

Menurut Ghazali (2018), “Tujuan dari menganalisis data adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan dalam sebuah data dan hasil yang didapat dari menganalisis data digunakan sebagai solusi untuk memecahkan suatu masalah”. Pada penelitian ini program komputer yang digunakan untuk menganalisis data yaitu aplikasi IBM SPSS 26 (*Statistic Product & Service Solution 26*). Berikut adalah teknik-teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:

3.5.1 Menilai Kelayakan Model Regresi

Dalam analisis regresi logistik, salah satu tahapan krusial adalah mengevaluasi kelayakan (fit) model yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Kelayakan ini dinilai melalui Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test. Menurut Hosmer, Lemeshow, & Sturdivant (2013), uji Hosmer–Lemeshow merupakan salah satu prosedur standar untuk mengevaluasi *goodness-of-fit* model regresi logistik. Uji ini dilakukan dengan membandingkan frekuensi observasi aktual dengan frekuensi yang diprediksi oleh model pada sejumlah kelompok yang dibentuk berdasarkan probabilitas estimasi. Biasanya, data dibagi menjadi 10 kelompok (deciles of risk), mulai dari probabilitas terendah hingga tertinggi, lalu dilakukan uji Chi-Square untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan antara nilai aktual dengan nilai prediksi pada setiap kelompok.

Prinsip dasar uji Hosmer–Lemeshow:

- Hipotesis nol (H_0): tidak ada perbedaan antara nilai observasi dan prediksi model, artinya model sesuai (fit) dengan data.
- Hipotesis alternatif (H_a): terdapat perbedaan signifikan antara observasi dan prediksi model, model tidak fit.

Kriteria pengambilan keputusan:

- Jika nilai signifikansi (p-value) $> 0,05$, H_0 tidak ditolak, model dianggap fit dengan data (model mampu merepresentasikan data empiris dengan baik).
- Jika nilai signifikansi (p-value) $\leq 0,05$, H_0 ditolak, model dianggap tidak fit dengan data (model kurang mampu menjelaskan data).

Dengan demikian, hasil uji Hosmer–Lemeshow memberikan gambaran awal apakah model regresi logistik dapat dipercaya untuk digunakan dalam pengujian hipotesis lebih lanjut.

3.5.2 Menilai Model Fit (Overall Model Fit Test)

Selain kelayakan model secara umum, penting juga untuk menilai apakah model regresi logistik yang dihipotesiskan benar-benar fit dengan data secara keseluruhan. Uji ini dilakukan dengan pendekatan Overall Model Fit Test,

yang pada dasarnya mengevaluasi apakah penambahan variabel independen dalam model meningkatkan kemampuan prediksi dibandingkan dengan model yang hanya berisi konstanta saja. Menurut Menard (2010), pengujian ini dilakukan menggunakan statistik -2 Log Likelihood (-2LL) yang berasal dari fungsi Likelihood. Likelihood (L) merepresentasikan probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan dapat menjelaskan data yang diamati. Nilai L kemudian ditransformasikan menjadi -2LogL untuk memudahkan pengujian statistik.

3.5.3 Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square)

Dalam regresi linier, kekuatan model biasanya dilihat dari nilai R Square (R^2) yang menunjukkan seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Namun, pada regresi logistik, perhitungan R^2 tidak bisa dilakukan secara langsung karena model bekerja dengan probabilitas, bukan nilai kontinu. Oleh karena itu, digunakan ukuran alternatif yang disebut Pseudo R Square. Menurut Cox & Snell (1989), ukuran Pseudo R^2 awalnya dikembangkan untuk regresi logistik, tetapi nilai ini tidak pernah mencapai 1 (maksimal < 1). Untuk mengatasi keterbatasan ini, Nagelkerke (1991) mengusulkan modifikasi yang dikenal sebagai Nagelkerke R Square, sehingga nilainya dapat berkisar antara 0–1 dan lebih mudah diinterpretasikan seperti R^2 dalam regresi linier.

3.5.4 Tabel Klasifikasi

Dalam regresi logistik, selain melihat uji kelayakan model dan koefisien determinasi, peneliti juga perlu mengevaluasi kekuatan prediksi model. Salah satu cara yang umum digunakan adalah melalui tabel klasifikasi (classification table). Menurut Hosmer & Lemeshow (2000), tabel klasifikasi membandingkan nilai aktual variabel dependen dengan nilai yang diprediksi model berdasarkan probabilitas tertentu. Secara default, SPSS menggunakan batas (*cut-off*) 0,5, artinya:

- Jika probabilitas prediksi $\geq 0,5 \rightarrow$ kasus diklasifikasikan ke kategori “1” (misalnya menerima opini *Going Concern*).

- Jika probabilitas prediksi $< 0,5 \rightarrow$ kasus diklasifikasikan ke kategori “0” (misalnya tidak menerima opini *Going Concern*).

3.5.5 Model Regresi Logistik

Berdasarkan sifat variabel dependen, yaitu Opini Audit *Going Concern*, yang merupakan variabel kualitatif dengan dua kategori (misalnya, diberi opini *Going Concern* atau tidak), metode analisis yang paling tepat adalah Regresi Logistik Biner (*Binary Logistic Regression*). Meskipun secara konseptual penelitian ini menguji hubungan dengan beberapa variabel independen (lebih dari satu), yang memang mengarah pada analisis regresi berganda, penggunaan model regresi linier berganda konvensional tidak sesuai karena variabel dependen bukan data rasio atau interval. Beberapa penelitian juga menggunakan metode ini untuk variabel dependen yang serupa: Penelitian Widhiastuti & Putu Diah Kumalasari (2022) menyatakan, "Pengujian regresi logistik dilakukan pada 224 sampel perusahaan..."; Penelitian Mulyana, Yuni Iswari, R Nelly Nur Apandi (2023) juga menggunakan, "*Hypothesis testing using logistical regression analysis*"; Demikian pula, Pestaria & Fitriani (2023) menegaskan, "Data analysis using binary logistic regression analysis method." Persamaan dalam penelitian ini yaitu:

$$\ln\left(\frac{OAGC}{1-OAGC}\right) = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \beta_4 (X_1 \times Z) + \beta_5 (X_2 \times Z)$$

- α (alpha) : Opini Audit *Going Concern*
 $OAGC$: Konstanta
 $\beta_1 X_1$: Dewan Direksi
 $\beta_2 X_2$: Pengungkapan ESG
 $\beta_3 Z$: Umur Perusahaan
 $\beta_4 (X_1 \times Z)$: Variabel Interaksi 1 (Dewan Direksi ke OAGC)
 $\beta_5 (X_2 \times Z)$: Variabel Interaksi 2 (ESG ke OAGC)
 e : Standar error / kesalahan

3.5.6 Uji Hipotesis

Setelah model regresi logistik dinyatakan memadai melalui pengujian kecocokan (*goodness-of-fit*) dan kelayakan keseluruhan model, pengujian hipotesis dilakukan pada tingkat koefisien masing-masing variabel. Pada regresi logistik biner, *uji Wald* digunakan untuk menilai apakah koefisien regresi (β) berbeda signifikan dari nol, dengan hipotesis nol (H_0): $\beta = 0$ dan hipotesis alternatif (H_a): $\beta \neq 0$. Keputusan diambil berdasarkan nilai signifikansi (*p-value*) hasil *uji Wald*; koefisien dinyatakan signifikan jika $p \leq 0,05$ (Gallizo & Saladrigues, 2016). Selain itu, interpretasi substantif dari hasil pengujian dapat dilakukan melalui nilai *odds ratio* ($Exp(\beta)$). *Odds ratio* menggambarkan perubahan peluang terjadinya peristiwa (misalnya perusahaan menerima opini audit *Going Concern*) untuk setiap kenaikan satu satuan variabel independen dengan asumsi variabel lain konstan. Jika $Exp(\beta) > 1$, maka peningkatan variabel independen meningkatkan peluang terjadinya peristiwa; sedangkan jika $Exp(\beta) < 1$, maka peningkatan variabel independen menurunkan peluang tersebut (Gallizo & Saladrigues, 2016)

Secara operasional, pengujian hipotesis dalam penelitian ini mencakup:

- H1 (Pengaruh Dewan Direksi/ X_1). Koefisien β_1 diuji dengan *Wald*; $p \leq 0,05$ menunjukkan bahwa Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap opini audit *Going Concern*. Nilai $Exp(\beta_1)$ diinterpretasikan sebagai perubahan *odds* penerimaan opini *Going Concern* untuk setiap tambahan anggota dewan direksi. Penelitian Gallizo & Saladrigues (2016) menggunakan pendekatan serupa dengan menilai signifikansi koefisien logit melalui *Wald test*.
- H2 (Pengaruh ESG/ X_2). Koefisien β_2 diuji dengan *Wald*; $p \leq 0,05$ menandakan bahwa *ESG disclosure* berpengaruh signifikan. Nilai $Exp(\beta_2)$ menunjukkan perubahan *odds* penerimaan opini *Going Concern* untuk setiap peningkatan skor *ESG*. Studi Wang, Song, & Sun (2023) juga menggunakan regresi logistik untuk menguji hubungan *ESG* dengan opini auditor, serta menafsirkan hasil melalui *odds ratio*.
- H3–H4 (Moderasi Umur Perusahaan/ Z). Efek moderasi diuji melalui interaksi $X_1 \times Z$ dan $X_2 \times Z$. Koefisien interaksi diuji dengan *Wald*; $p \leq 0,05$

menunjukkan bahwa umur perusahaan memoderasi hubungan variabel independen dengan opini audit *Going Concern*. Untuk mengurangi potensi multikolinearitas, variabel kontinu di-*center* sebelum membentuk interaksi, sebagaimana praktik umum pada regresi moderasi (Wang & Song, 2023).

Untuk menjaga validitas inferensi, hasil *uji Wald* dan *odds ratio* dilaporkan bersama metrik evaluasi model lain yang lazim digunakan, yaitu $-2 \text{ Log Likelihood}$, *Nagelkerke R²*, dan *classification table* (Gallizo & Saladrigues, 2016). Praktik pelaporan serupa banyak ditemui dalam penelitian empiris di Indonesia, seperti studi Hamid (2021) yang meneliti opini audit *Going Concern* pada masa pandemi, Ardillah et al. (2023) yang menguji determinan opini audit di sektor pertambangan, serta Devitamala & Buana (2022) yang menganalisis pengaruh leverage, profitabilitas, dan arus kas terhadap opini audit.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dewan Direksi dan pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) terhadap Opini Audit *Going Concern* (OAGC) dengan umur perusahaan sebagai variabel pemoderasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Berdasarkan hasil analisis regresi logistik dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Dewan Direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit *Going Concern*. Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran Dewan Direksi belum menjadi faktor yang secara langsung dipertimbangkan auditor dalam menentukan penerbitan Opini Audit *Going Concern*. Meskipun arah hubungan menunjukkan kecenderungan negatif, secara statistik pengaruh tersebut tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah anggota Dewan Direksi tidak selalu mencerminkan efektivitas pengawasan dan pengambilan keputusan yang relevan bagi penilaian kelangsungan usaha perusahaan. Dengan demikian, hipotesis pertama dalam penelitian ini dinyatakan **ditolak**.
2. Pengungkapan ESG tidak berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit *Going Concern*. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan ESG belum menjadi determinan utama dalam penilaian auditor terkait risiko *Going Concern* pada perusahaan sektor energi. Meskipun ESG secara konseptual mencerminkan komitmen keberlanjutan dan legitimasi perusahaan, auditor cenderung lebih memprioritaskan indikator keuangan dan operasional yang bersifat langsung dan terukur. Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini dinyatakan **ditolak**.

3. Umur perusahaan memoderasi secara signifikan pengaruh Dewan Direksi terhadap Opini Audit *Going Concern*. Temuan ini menunjukkan bahwa pada perusahaan dengan umur yang lebih tua, peran Dewan Direksi menjadi lebih relevan dalam memengaruhi probabilitas penerimaan Opini Audit *Going Concern*. Hal ini mengindikasikan bahwa pengalaman operasional dan kematangan organisasi memperkuat fungsi Dewan Direksi dalam pengelolaan risiko dan pengawasan manajerial. Dengan demikian, hipotesis keempat dalam penelitian ini dinyatakan **diterima**.
4. Umur perusahaan tidak memoderasi pengaruh pengungkapan ESG terhadap Opini Audit *Going Concern*. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan yang lebih tua umumnya memiliki stabilitas dan pengalaman yang lebih besar, pengungkapan ESG tetap tidak menjadi faktor yang cukup kuat untuk mengubah pertimbangan auditor terkait *Going Concern*. Auditor tetap berfokus pada kondisi keuangan dan operasional aktual dibandingkan sinyal keberlanjutan yang bersifat reputasional. Oleh karena itu, hipotesis kelima dalam penelitian ini dinyatakan **ditolak**.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan keberlanjutan perusahaan. Penggunaan data sekunder menyebabkan peneliti tidak dapat mengendalikan sepenuhnya kualitas, kelengkapan, dan konsistensi pengungkapan antarperusahaan, sehingga berpotensi memengaruhi ketepatan pengukuran variabel penelitian.
2. Analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi logistik dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Meskipun metode ini memadai untuk menguji hubungan probabilistik, model yang digunakan masih bersifat linier pada log-odds dan belum sepenuhnya menangkap kemungkinan hubungan nonlinier atau mekanisme mediasi yang lebih kompleks antarvariabel.
3. Penelitian ini belum memasukkan variabel keuangan sebagai variabel mediasi, seperti profitabilitas, arus kas, atau tingkat leverage, yang secara teoritis dan empiris sangat berpengaruh terhadap penerimaan Opini Audit *Going Concern*. Hal ini membatasi kemampuan penelitian dalam

menjelaskan mekanisme tidak langsung antara ESG, tata kelola, dan keputusan auditor.

5.3 Saran

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel keuangan sebagai variabel mediasi atau kontrol, sehingga mekanisme hubungan antara Dewan Direksi, pengungkapan ESG, dan Opini Audit *Going Concern* dapat dijelaskan secara lebih komprehensif.
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode analisis yang lebih fleksibel, seperti regresi panel logistik atau pendekatan nonlinier, agar mampu menangkap pola hubungan yang lebih kompleks dan tidak linear antarvariabel.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pengukuran ESG dengan memisahkan dimensi lingkungan, sosial, dan tata kelola, sehingga dapat diketahui dimensi mana yang lebih relevan dalam konteks penilaian auditor terhadap risiko *Going Concern*, khususnya pada sektor energi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2012). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Salemba Empat.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2008). *Auditing dan Jasa Assurance* (Edisi Keduabelas). Erlangga.
- Berle, A. A., & Means, G. C. (1932). *The modern corporation and private property*. New York: Macmillan.
- Boynton, W. C., Johnson, R. N., & Kell, W. G. (2003). *Modern Auditing*. Salemba Empat.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2015). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* (Edisi ke-11). Salemba Empat.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2006). *Business Research Methods*. McGraw-Hill.
- Febliza, A., & Afdal, Z. (2015). *Statistik Dasar Penelitian Pendidikan*. Adefa Grafika.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate (Edisi 10)*.
- Guy, D. M., Alderman, C. W., & Winters, A. J. (2003). *Auditing*. Erlangga.
- Hasan, M. I. (2012). *Pokok-pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif)*. Bumi Aksara.
- Hery. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Grasindo.
- IAI, I. A. I. (2015). Ikatan Akuntansi Indonesia 2016. *Penyajian Laporan Keuangan, 1*, 24. [https://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_publicasi/ED PSAK 1 \(26 Juni 2015\).pdf](https://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_publicasi/ED_PSAK_1_(26_Juni_2015).pdf)
- Indonesia, D. M. R. dan K. P. B. E. (2024). Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia Versi 2.0. *Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia Tahun 2024*, 1–41. <https://www.idx.co.id/media/7343/pedoman-tata-kelola-perusahaan-pt-bursa-efek-indonesia.pdf>
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2011). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Salemba Empat.
- Kasmir. (2015). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Kencana.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.
- Libby, R., Libby, P. A., & Short, D. G. (2007). *Akuntansi Keuangan* (Edisi Kelima). Andi.
- Ridho, Z. K., Siregar, N., & Sitorus, A. H. (2023). *Praktik ESG dan Kinerja Perusahaan*. Deepublish.
- Riyanto, B. (2010). *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. BPFE.
- Rudianto. (2012). *Pengantar Akuntansi: Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Erlangga.
- Samryn, L. M. (2012). *Akuntansi Manajemen*. Kencana.
- Sino-Securities Index Bond ESG Ratings Methodology*. (2023). 1–9.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supramono, & Listiani, N. (2023). *Karakteristik dan Nilai Perusahaan yang Dikelola Manajer Overconfidence*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Tandiontong, M. (2015). *Kualitas Audit dan Pengukurannya*. 1–248.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya disertai Panduan EViews* (Edisi ke-5). UPP STIM YKPN.
- Abundanti, S. L. A. (2018). Pengungkapan *Environmental, Social, Governance* (ESG) dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar pada Indeks Sri Kehati di Bursa Efek Indonesia tahun 2013–2016. *Universitas Sanata Dharma*.
- Adardour, Z., Ed-Dafali, S., Mohiuddin, M., El Mortagi, O., Sbair, H., & Bouzahir, B. (2025). Exploring the drivers of *Environmental, Social, and Governance* (ESG) disclosure in an emerging market context using a mixed methods approach.

- Future Business Journal*, 11(1). <https://doi.org/10.1186/s43093-025-00530-w>
- Adi, S. A., & Suwarti, T. (2022). Pengaruh penerapan good corporate *Governance* terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2018–2020. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 13(3).
- Aida Sapitri, Siska Saputri, D. (2025). Pengaruh Sustainability Reporting Disclosure Index Dan Financial Distress Terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern* Pada Perusahaan Energy Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Journal Of Islamic Finance And Accounting Research*, 4(1 FEBRUARI), 23–42. <https://doi.org/10.25299/jafar.2025.20769>
- Akbar, I. (2020). Pengungkapan *Environmental, Social, Governance* (ESG) dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2015–2019. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Modern (JAKM)*, 6(1), 158–175.
- Akbar, R., & Ridwan. (2019). Pengaruh kondisi keuangan perusahaan, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan reputasi KAP terhadap penerimaan opini audit *Going Concern* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015–2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(2), 286–303.
- Alam, A., & Nuhu, Y. (2024). Board Characteristics And ESG Disclosure In Energy Industry: Evidence From Emerging Economies. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 2022.
- Alareeni, B. A., & Hamdan, A. (2020). ESG impact on performance of US S&P 500-listed firms. *Corporate Governance (Bingley)*, 20(7).
- Amelinda, T. N., & Rachmawati, L. (2021). Pengaruh penerapan good corporate *Governance* terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 4(1), 33–34.
- Amyulianthy, R. (2012). Pengaruh struktur corporate *Governance* terhadap kinerja perusahaan publik Indonesia. *Jurnal Liquidity*, 1(2), 91–98.
- Anandamaya, L. P., & Hermanto, S. B. (2021). Pengaruh good corporate *Governance*, ukuran perusahaan dan leverage terhadap kinerja keuangan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(1).
- Andika, L., & Istanti, S. L. (2024). Pengaruh dewan komisaris independen, struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan. *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 5(2), 81–92.
- Ardillah, K., Larassati, A., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Teknologi, I. (2023). *DETERMINANTS OF ACCEPTANCE OF GOING CONCERN AUDIT OPINION ON MANUFACTURING COMPANIES IN INDONESIA*. 5(2), 1–14.
- Devitamala, N., & Buana, U. M. (2022). *THE EFFECT OF LEVERAGE , PROFITABILITY AND CASH FLOW ON GOING CONCERN AUDIT OPINION AND ITS*. 2(12), 2776–2791.
- Dubelta, S. J., Kuntadi, C., & Supaijo. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit *Going Concern*: kualitas audit, manajemen laba, dan mekanisme corporate *Governance*. *Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah (JPAES)*, 1(2), 19–31.
- El Deeb, M., Elsayed, A. H., & El-Halawany, M. (2023). ESG practices and the cost of debt: Evidence from EU countries. *Critical Perspectives on Accounting*, 79.
- ESR. (2024). *Indonesia energy transition outlook 2025*. Jakarta: Institute for Essential Services Reform.
- Febriana, D., & Sofianti, S. P. D. (2016). Analisis pengaruh rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, aktivitas dan opini *Going Concern* tahun sebelumnya terhadap opini audit *Going Concern*. *Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNEJ Jember*, 4(1).
- Fidiana. (2023). *Corporate going-concern report in early pandemic situation*. Heliyon, 9(4), e10113871.

- Firmansyah, R., & Idayati, F. (2021). Pengaruh good corporate *Governance* dan leverage terhadap kinerja keuangan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(1).
- Fitriani, F. S., Harahap, R. D., & Nurlaila, N. (2023). Perkembangan UMKM Di Indonesia : Peran Pemahaman Akuntansi, Teknologi Informasi dan Sistem Informasi Akuntansi. *Owner*, 7(3), 2518–2527.
<https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1427>
- Gallizo, J. L., & Saladrighes, R. (2016). *An analysis of determinants of Going Concern audit opinion : Evidence from Spain stock exchange*. 12(1), 1–16.
- Gao, Y. (2025). Short-term impact of ESG performance on default risk in Chinese energy sector companies. *Administrative Sciences*, 15(9), 352.
- Ghazali, A., & Zulmaita. (2020). Pengaruh pengungkapan *Environmental*, *Social*, and *Governance* (ESG) terhadap tingkat profitabilitas perusahaan (Studi pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Prosiding SNAM PNJ*, 1–13.
- Ginting, S., & Tarihoran, A. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi pernyataan *Going Concern*. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 7(1).
- Hamid, M. F. (2021). PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE *GOVERNANCE* , *LEVERAGE* , DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP OPINI *GOING CONCERN*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Vol 9 No 1.
- Hadyan, M. (2021). Pengaruh good corporate *Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 4(2).
- Hidayat, M., Cahyaningtyas, H. R., & Mariadi, Y. (2023). Analisis mekanisme good corporate *Governance* terhadap kinerja perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2021. *Jurnal RISMA*, 3(1).
- IAI. (2015). *Penyajian Laporan Keuangan (ED PSAK 1)*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Indonesia, D. M. R. dan K. P. B. E. (2024). *Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia Versi 2.0*.
- Intia, L. C., & Azizah, S. N. (2021). Pengaruh dewan direksi, dewan komisaris independen, dan dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, 7(2).
- Irma, A. D. (2019). Pengaruh komisaris, komite audit, struktur kepemilikan, size dan leverage terhadap kinerja keuangan perusahaan properti, perumahan dan konstruksi 2013–2017. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 7(1).
- Islam, S. M. M., Rahman, M. M., & Bhuiyan, M. B. U. (2025). Exploring how corporate maturity moderates the value relevance of ESG disclosures: Evidence from Bangladesh. *Sustainability*, 17(13), 5936.
- Istiqomah, A. A., & Riharjo, I. B. (2023). Pengaruh kualitas penerapan good corporate *Governance* terhadap kinerja keuangan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12(1).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Jensen, M., & Meckling, W. (2012). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader* (3rd ed., pp. 283–303).
- Li, W. A., Du, H., & He, F. (2025). Mandatory corporate ESG disclosure and default risk – Evidence from China. *Pacific Basin Finance Journal*, 89(August 2024), 102578. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2024.102578>
- Nadzif, N., & Agung Durya, N. P. M. (2022). Pengaruh kualitas audit, debt ratio, ukuran perusahaan, audit lag terhadap opini audit *Going Concern*. *Inovatif*, 1(2), 206–221.
- Nisa, A. Z., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2023). Pengaruh Pengungkapan *Environmental*, *Social*, dan *Governance* terhadap Kinerja Perusahaan. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(5), 2400–2411.

- <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.3410>
- Pestaria, M. P., & Fitriani, I. (2023). *Bagaimana Opini Audit Going Concern Diterima ?* 11(2), 383–400. <https://doi.org/10.17509/jrak.v11i2.59101>
- Prihantini, F. N., Januarti, I., & Darsono. (2025). Evaluating the Impact of Board Effectiveness and Audit Committee Performance on Audit Quality during the Covid-19 Pandemic: Evidence from Indonesian Firms. *International Journal of Economics and Financial Issues* , 15(3), 254–261. <https://doi.org/10.32479/ijefi.17587>
- Purnamasari, F. F., Oktavia, R., & Tubarad, C. P. T. (2020). Pengaruh good corporate Governance terhadap opini Going Concern. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 25(2), 32–43.
- Puspaningsih, A., & Zulfikri, M. (2021). *Drivers of Going Concern audit opinions: Empirical evidence from Indonesia*. Review of Integrative Business and Economics Research, 10(S1), 26–39.
- Putri, A. A., & Paramita, V. S. (2025). *The Effect of ESG Disclosure , Green Investment , and Carbon Emission Disclosure on the Value of Energy Companies in Indonesia : Analysis for the 2019-2023 Period*. 1, 16–33.
- Ruan, L., & Liu, H. (2021). *Environmental, Social, Governance activities and firm performance: evidence from China*. Sustainability (Switzerland), 13(2), 1–16. <https://doi.org/10.3390/su13020767>
- Shaferi, I., Laksana, R. D., & Wahyudi, S. (2018). The effect of risk leverage on investors' preferences in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. *Investment Management and Financial Innovations*, 15(3), 190–198.
- Sibarani, L. C., Machdar, N. M., Indonesia, K., & Ekonomi, F. (2025). *Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Good Corporate Governance Dan Sustainability Report Terhadap Opini Audit Going Concern*. 01(04), 937–944.
- Wang, X., Song, X., & Sun, M. (2023). *How does a company's ESG performance affect the issuance of an audit opinion? The moderating role of auditor experience*. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(5), 3878.
- Widhiastuti, N. L. P., & Kumalasari, P. D. (2022). Opini audit Going Concern dan faktor-faktor penyebabnya. *Akurasi*, 5(1), 121–138.
- Zahari, T. N. (2023). Review of policies for Indonesia's electricity sector: Economic, Social, and Environmental impacts. *Energies*, 16(8), 3406.
- Zhou, D., Saeed, U. F., & Agyemang, A. O. (2024). Assessing the Role of Sustainability Disclosure on Firms' Financial Performance: Evidence from the Energy Sector of Belt and Road Initiative Countries. *Sustainability (Switzerland)*, 16(2). <https://doi.org/10.3390/su16020930>
- Yuni Iswari , R Nelly Nur Apandi, A. W. (2023). *Pengaruh aspek keuangan dan non keuangan terhadap opini audit pada pemerintah kabupaten dan kota di Republik Indonesia*. 229, 1–28. <https://doi.org/10.26418/apssai.v3i1.45>